

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi November III Tahun 2021 No. 24

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M.,M.Ed.*

*Dianggap Menabrak  
Nilai Agama dan Pancasila*

**Cabut Permen  
Dikbudristek  
No. 30 Tahun  
2021**



# Bukan Sekedar Frasa

Kekerasan seksual tidak hanya bisa dipandang sebagai aktivitas fisik yang memaksa, namun juga harus dilihat sebagai kejahatan seksual. Penggunaan diksi kejahatan seksual atau tindak pidana kesusilaan akan lebih integral mencakup aturan seks kekerasan dan seks di luar ikatan pernikahan.

Undang-undang atau peraturan harus bersikap komprehensif, tidak boleh menyisakan satu ruang pun untuk bisa dimanfaatkan. Penolakan Fraksi PKS terhadap peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 salah satunya karena di dalamnya tercantum Frasa '*Dengan Persetujuan Korban*' pada Pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M yang sejatinya membuka peluang liberalisasi kehidupan seksual di Kampus.

Prof Romli Amtasasmita Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Unpad menilai Permendikbud

Ristek 30/2021 ternodai Frasa '*Dengan Persetujuan Korban*'. Frasa tersebut terlepas dari niat baik atau tidak, tetap patut disesalkan karena frasa yang semula memberikan kepastian akan jaminan perlindungan kaum perempuan dan orang tuanya menjadi kontra produktif.

Justru, kata Prof Romli, frasa tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat khususnya para orang tua. Yaitu apakah Permendikbud tersebut hendak menciptakan kampus merdeka berseks bebas.

Kita tidak ingin ada 'penumpang gelap' yang melekat dari sebuah aturan yang adiluhung, karena dapat

mencederai niat baik di awal dan kerja keras hingga akhir. Permendikbud Ristek No 30 membuka peluang penumpang gelap suka sama suka tidak ada sanksi hukumnya, tentu sangat bahaya. Padahal selama ini sudah sangat banyak kasus kehamilan diluar nikah, bahkan berujung pada aborsi.

Kekerasan seksual tidak hanya bisa dipandang sebagai aktivitas fisik yang memaksa, namun juga harus dilihat sebagai kejahatan seksual. Penggunaan diksi kejahatan seksual atau tindak pidana kesusilaan akan lebih integral mencakup aturan seks kekerasan dan seks di luar ikatan pernikahan.

Justru kita dibuat aneh, mengapa ada pihak yang secara penetratif atau 'getol' masuk ke lembaga pendidikan, lembaga negara dan sebagainya memperjuangkan frasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, agama, budaya dan Pancasila. Frasa '*Dengan Persetujuan Korban*'; karena dengan pencantuman frasa tersebut sebuah UU punya makna yang sangat jauh berbeda, bahkan melenceng dari tujuan awal.

Mas Menteri Nadiem Makarim sudah sepantasnya harus memandang situasi ini sebagai momentum titik balik penuntasan kejahatan seksual yang sistemik. bukan parsial, apalagi pelegalan seks bebas.

Kesadaran serta sensitifitas terhadap bahaya legalisasi seksual bukan hanya harus ditumbuhkan, namun menjadi 'alarm' penting dalam tata kehidupan sosial dan perundangan kita.

Kita tidak boleh menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa frasa itu tidak bermakna apa-apa atau sebaliknya, karena sejatinya sebuah regulasi dibuat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia oleh karenanya harus ditelaah dengan cermat, hati-hati dan seksama. Cabut Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 !



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Dianggap Menabrak Nilai Agama dan Pancasila Politisi PKS Desak Nadiem **Cabut** Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

## KUTIPAN

Jakarta (08/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menyoroti Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Saat memberikan keterangan pers bersama pimpinan Fraksi PKS, Fahmy pun tak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin, (08/11).

"Kami mengucapkan selamat, kepada Panglima TNI Andika. Kami mendukung sepenuhnya. Semoga sukses menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Fahmy, yang tidak kalah pentingnya, selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, yakni pentingnya ketahanan moral dan peradaban bangsa.

"Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, pentingnya ketahanan Moral dan

Peradaban Bangsa. Ada ancaman serius yang tidak disadari, di depan mata kita. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan-Ristek telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang 'Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi', terang Anggota DPR asal Dapil Jabar V ini.

Peraturan Menteri ini, imbuhan Fahmy, hadir begitu saja di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

"Terbitnya Permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat," ujarnya.

Sejumlah ormas, kata Fahmy, seperti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan Peraturan Mendikbud-Ristek ini Mengapa ..?

"Saya yakin maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini ingin menghilangkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun sayangnya Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (a-susila) yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktik perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT)," terang Fahmy.

Peraturan ini, katanya, hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Kami meminta Kemedikbud-Ristek Pemerintah dan mengajak dan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah dan melindungi semua pelajar dan mahasiswa kita dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan segala bentuk perbuatan asusila seksual yg dilarang Agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanah UUD 1945



# Mardani soal Permendikbud PPKS: Itu Jelas Sekali Pelegalan Kebebasan Sex!

## KUTIPAN

Ada celah moral yang bisa melegalkan seks di lingkungan kampus dalam permendikbud itu. "Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi," tuturnya

Jakarta (10/11) — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut mengkritik Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Mardani bahkan menuding permendikbud itu jelas melegalkan kebebasan seks. Hal itu disampaikan oleh Mardani lewat akun Twitternya, @MardaniAliSera.

Mardani mengatakan bahwa ia anti-kekerasan seks, tetapi tidak menoleransi kebebasan seks.

"Itu jelas sekali berisi 'pelegalan' kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun

tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan," kata Mardani, Rabu (10/11/2021).

Dia mengatakan ada celah moral yang bisa melegalkan seks di lingkungan kampus dalam permendikbud itu.

"Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi," tuturnya.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

"Itu jelas sekali berisi 'pelegalan' kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan,"

# Aleg PKS: Permendikbud 30 Tahun 2021 Ancaman bagi Target Program Keluarga Berkualitas dan Generasi Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (08/11) — Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjadi ancaman bagi keluarga Indonesia dan generasi bangsa yang menjadi semangat dan program BKKBN. Demikian pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Kurniasih Mufidayati.

Menurut Mufida, Permendikbud ini telah mengatur praktik kekerasan seksual, justru dengan membuka peluang kebebasan seksual. Kondisi tersebut pasti berdampak negatif besar terhadap keluarga dan generasi bangsa.

Ia mengungkapkan penggunaan terminologi kekerasan yang sama saja dengan pembiaran terjadinya persetujuan tindakan seksual di luar norma agama. Tindakan pidana hanya dilakukan jika dalam tindakan seksual di luar pernikahan dan penyimpangan seksual terjadi karena ada unsur kekerasan. Apabila tanpa unsur kekerasan,

maka tidak bisa ditindak dalam aturan ini.

"Bagaimana mungkin seorang Menteri Pendidikan yang menjadi panutan bangsa, membuat kebijakan melegalkan praktik kebebasan seksual di kampus? Civitas kampus bukan hanya mahasiswa tapi juga tenaga pendidik maupun mereka yang bekerja di kampus dan sudah berkeluarga. Apa semangat boleh melakukan hubungan seksual asal ada persetujuan meski bukan dengan pasangan sah yang diinginkan dalam aturan ini?" ungkap Mufida tegas.

Mufida menyebut jika tidak

ditarik kembali atau direvisi, aturan ini akan mengancam ketahanan keluarga Indonesia. Permendikbud ini melarang untuk aborsi dan pemaksaan kehamilan tapi justru tidak melarang penyebab dua hal tersebut yakni hubungan seksual bagi pasangan tidak menikah.

"Sudah banyak kita saksikan jika ada anak muda yang hamil di luar nikah akan jadi persoalan terhadap dirinya dan keluarganya. Padahal masih dalam masa pendidikan di kampus. Melarang dampak seks bebas tapi tidak melarang seks bebas itu sendiri jelas satu kebijakan yang tidak benar," sebut dia.

Mufida meminta pemerintah terlebih lagi Kemendikbud Risti mengkaji terlebih dulu jika akan membuat aturan, dan hendaknya aturan satu lembaga dengan lembaga pemerintah lain tidak saling bertentangan. Ia mengingatkan kebijakan satu instansi harus sinkron dengan instansi yang lain.

"Dalam relasi lawan jenis



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Sudah banyak kita saksikan jika ada anak muda yang hamil di luar nikah akan jadi persoalan terhadap dirinya dan keluarganya. Padahal masih dalam masa pendidikan di kampus. Melarang dampak seks bebas tapi tidak melarang seks bebas itu sendiri jelas satu kebijakan yang tidak benar,"

kebijakan kita fokus kepada keluarga. Ada pernikahan lalu ada perencanaan seperti di BKKBN. Selama ini kami di Komisi IX memberikan edukasi Program Genre kepada para Remaja dan Pemuda Pemudi. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena

mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sehingga tidak ada semangat kebebasan dalam relasi lawan jenis di kehidupan kita sebagai sebuah negara," tutur Mufida.

# Permendikbud No 30/2021, Aleg PKS: Pembentukannya Minim Partisipasi Publik

## KUTIPAN

Jakarta (12/11) Legislator Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih menuturkan bahwa sebuah peraturan sebaiknya mengakomodir masukan dari berbagai elemen masyarakat agar tidak menimbulkan kontroversi pasca disahkannya.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam kesempatan PKS Legislative Corner pada Jumat siang (12/11/2021).

“Undang-undang seharusnya bersifat komprehensif dan menjadi titik temu bagi setiap usulan masyarakat.

Permendikbud ini memang di satu sisi bagus untuk memayungi permasalahan kekerasan seksual di kampus, namun di sisi lain jangan sampai ada memunculkan problematika yang lebih besar bagi generasi mendatang.” Ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.

PKS Legislative Report bertajuk “Cabut! Permendikbud No 30/2021” mengulas mengenai pandangan Fraksi PKS yang mempermasalahkan adanya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ di Pasal 5.

Frasa tersebut secara filosofis dinilai multitafsir, seakan meleagalkan hubungan seks diluar pernikahan dengan alasan suka sama suka dan non kekerasan.

Permendikbud No 30/2021 yang membahas mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut dibentuk untuk mengatur proses pengaduan, sanksi hingga konseling baik bagi korban maupun pelaku. Sebelumnya pun sudah ada produk hukum UU No 22 Tahun 2015 yang membahas mengenai hal yang sama meskipun belum spesifik.

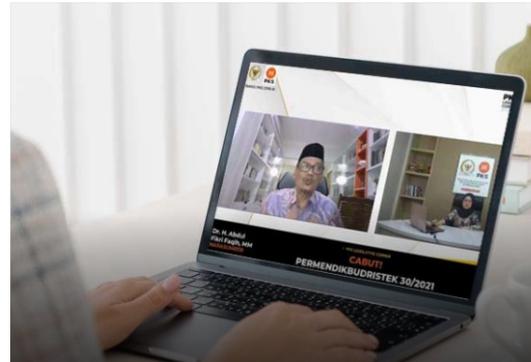
“Perlu ada penjelasan dari produk hukum yang sebelumnya apakah implementasinya belum efektif atau bagaimana. Substansi UU No 22 Tahun

2015 ini juga sama sekali tidak disinggung tentang persetujuan korban. Nah ini yang memunculkan kecurigaan adanya ideologi barat yang menunggangi permen ini.” Ungkap Fikri menyampaikan kekhawatirannya.

Pasalnya, dalam UU Pasal 31 Ayat 3 sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang utama adalah untuk membentuk ketaqwaan dan akhlaq mulia. Menurut Fikri, para stakeholder seharusnya membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan tidak merugikan kepentingan umum baik itu dalam segi norma maupun adat istiadat.

“Kita harus membangun budaya belajar mengajar di perguruan tinggi dan juga tingkatan pendidikan dibawahnya sesuai dengan cita-cita bangsa. Bangsa ini mengakui kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah seharusnya visi pendidikan sejalan dengan konstitusi negara.” Ujar Legislator Dapil Jawa Tengah 9 ini.

Beberapa pihak yang menolak permen ini seperti



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Kita harus membangun budaya belajar mengajar di perguruan tinggi dan juga tingkatan pendidikan dibawahnya sesuai dengan cita-cita bangsa. Bangsa ini mengakui kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah seharusnya visi pendidikan sejalan dengan konstitusi negara”

FPKS, perhimpunan MOI dan IKADI akan mengadakan pertemuan pada 24 November untuk membahas lebih dalam terkait aturan tersebut. Di akhir sesi, Fikri menekankan bahwa

visi pendidikan jangan hanya tertokatkan pada satu golongan, namun pendidikan adalah kepentingan bagi generasi kedepan yang perlu menggunakan visi berbangsa dan bernegara.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

---

**CATATAN KRITIS  
FRAKSI PKS DPR RI  
TERKAIT**

# **PERMEN DIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

**Tentang Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan  
Seksual Di Lingkungan  
Perguruan Tinggi**

# CATATAN KRITIS FRAKSI PKS DPR RI

Terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

## Catatan Penting

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tanggal 3 September 2021

Padahal Badan Legislatif DPR RI sedang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan berganti judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

**Wacana kekerasan seksual belum menjadi konsensus kebijakan, namun Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.**

## Point 1

**Permendikbudristek Menggunakan Definisi Kekerasan Seksual Yang Bias Pemahaman**

**Pasal 1 ayat 1** menyatakan:

"Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan **merendahkan**, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang **tubuh**, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan **relasi kuasa dan/atau gender**, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. "

### Catatan Kritis

Kata ' merendahkan ' sifatnya subyektif, sulit dicari tolak ukurnya.

Kata 'tubuh' bisa dipahami dengan banyak konteks, misal tubuh bagian mana atau bentuk tubuh atau pengelolaan tubuh atau cara berpakaian di tubuh.

Penggunaan frasa 'relasi kuasa ' dan 'relasi gender ', tidak berdasarkan Pancasila, dan diambil dari konstruksi pemikiran Barat yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin (sex), lelaki dan perempuan.

Penggunaan istilah gender adalah kebebasan memilih orientasi seksual dari jenis kelamin yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma kehidupan masyarakat Indonesia.

## Point 2

**Prinsip dalam pasal 3 Pasal 3**

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- kepentingan terbaik bagi Korban;
- keadilan dan kesetaraan gender;
- kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- akuntabilitas;
- independen;

- kehati-hatian;
- konsisten; dan
- jaminan ketidakterulangan.

**Meniadakan** norma agama dalam prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pasal 3 mengenai prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

### Catatan Kritis

Salah satu tujuan pendidikan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 pasal 3 adalah ' menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ', namun peraturan ini tidak memasukkan norma agama sebagai prinsip pencegahan. Meniadakan norma agama berarti menafikan bahwa norma agama merupakan bagian dari norma kehidupan masyarakat di mana masyarakat perguruan tinggi menjadi bagiannya. Hal ini juga menafikan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menaungi 4 sila berikutnya.

## Point 3

**Frasa 'identitas Gender' Pada Pasal 5 Ayat 2 Butir (a) Membuka Peluang Legalisasi Transgender Dan Perilaku Homoseksual**

pada pasal 5 ayat 2 butir (a) ini yang dianggap melakukan Kekerasan Seksual, jika :

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

Identitas gender merujuk kepada perasaan terdalam seseorang, internal dan pengalaman

gender secara individual, yang boleh atau tidak boleh dikaitkan dengan keadaan psikologi atau jenis kelamin tertentu ketika lahir. Hal ini bertentangan dengan kodrat manusia yang sudah ditentukan jenis kelaminnya lahir.

**Fakta menunjukkan bahwa perilaku homoseksual berpotensi meningkatkan resiko penularan HIV.**

### 50.282 KASUS

Data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan tahun 2019 menunjuk-kan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncak pada tahun 2019

Data UNAIDS 2019 Menunjukkan Bahwa Penyebab Resiko Penularan Tertinggi HIV Ini Berasal Dari Laki-laki Seks Dengan Laki-laki (LSL).

## Point 4

**Pasal 5 Ayat 2 Butir b, f, g, h, j, l, m Membuka Peluang Dibolehkannya Hubungan Seksual Yang Dilakukan Dengan Persetujuan**

Frasa 'tanpa persetujuan Korban ' berarti memberi peluang pemahaman dan penerapan apabila kegiatan yang disebutkan pada butir- butir pada pasal itu dilakukan dengan persetujuan, maka dinyatakan bukan kekerasan dan boleh dilakukan serta tidak dilakukan upaya pencegahan

butir (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

butir (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

butir (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

butir (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

butir (j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban

butir (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

butir (m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Perilaku Seks Bebas Merusak Moral Masyarakat Perguruan Tinggi Dan Dapat Berakibat Pada Tindak Kejahatan Yang Lain Seperti Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dan Pembunuhan.

**Aborsi Mahasiswa Dilakukan Di Kamar Kosnya Di Samarinda**  
(merdeka.com 23/9/2021)

**Aborsi Mahasiswa Dengan Usia Kehamilan 4 Bulan Di Purwakarta**  
(inewsjabar.id 24/7/2021)

**Mahasiswi Yang Dibunuh Pacarnya Karena Menolak Menggugurkan Kandungan Setelah Hidup Bersama Selama 1 Tahun**  
(sindonews.com 22/8/2021)

Data **kehamilan tidak diinginkan** terjadi pada perempuan yang belum menikah di pulau jawa sebanyak 34%, di mana ada 46% dari angka tersebut berusia 20-29 tahun

## Point 5

**Pasal 5 Ayat 3 Membuka Peluang Landasan Perilaku Seks Bebas Dengan Dasar Usia Yang Sudah Dewasa**

Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban: butir (a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Walaupun pasal ini berusaha memberi penjelasan terkait definisi persetujuan, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya aktivitas seksual secara legal hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan sebagaimana UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Pasal ini bisa disalahgunakan, karena mahasiswa sudah merasa berusia dewasa sehingga bebas melakukan hubungan seksual walaupun tanpa ikatan perkawinan selama ada persetujuan satu sama lain.

## Point 6

### Pasal 6 Ayat 2

Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

### Acuan Materi Modul Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Pasal 6 Ayat 2 Perlu Diperjelas

Pasal ini perlu memberikan penjelasan mengenai modul yang digunakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena definisi kekerasan seksual masih belum menjadi konsensus di perundang-undangan negara.

Saat ini Comprehensive Sexual Education masih menjadi acuan dalam format pendidikan seksual di mana dalam pembelajarannya menggunakan paradigma barat yaitu memberi pendidikan mengenai seks bebas aman (safe sex) yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tujuan sistem pendidikan Indonesia

## Point 7

### Pasal 24 Ayat 4 Pada Bab IV Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual; b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

### Ada Diskriminasi Pada Pasal 24 Ayat 4 Dalam Syarat Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Syarat pada poin b dan c mengunci kesempatan pihak lain untuk menjadi Panitia Seleksi, di mana dalam Pasal ini pihak yang boleh menjadi Panitia Seleksi hanya berasal dari kelompok Mahasiswa dan Pendidik yang menjadikan feminisme sebagai paradigma. Sementara Calon Panitia Seleksi yang sekalipun aktif mendampingi Korban Kekerasan Seksual, tetapi memiliki perbedaan paradigma, dan tidak melakukan Kajian Gender, akan tereliminasi untuk menjadi Panitia Seleksi.

## Point 8

### Permendikbud ristik ini seharusnya juga mengatur secara tegas terkait Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan

Mengacu pada Pasal 6 huruf g pada Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang berbunyi "Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan

kotor, tidak senonoh, melanggarkan kesopanan dan kesusilaan."

### Pengaturan Internalisasi Pendidikan Untuk Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Di Perguruan Tinggi Dapat Berupa:

1. Materi pendidikan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual di kampus (pelaporan, pendampingan, pemulihan);
2. Materi pendidikan tentang larangan dan bahaya seks bebas/pergaulan bebas serta konsekuensi dan dampak buruknya
3. Materi pendidikan tentang larangan dan bahaya pornografi, pornoaksi, dan miras yang bisa menjadi faktor pemicu kekerasan seksual;
4. Materi pendidikan tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk menciptakan pendidikan yang menghasilkan generasi berakhlak mulia, karena penanaman nilai-nilai agama dapat secara efektif mencegah terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan.

## Sikap

**Meminta Kepada Mendikbud Ristik untuk Mencabut atau Mengganti Permendikbud Ristik No 30 Tahun 2021 dengan aturan baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila.**

Permendikbud 30 Tahun 2021

# Menodai Nilai-nilai Pancasila



**Ledia: Hanya Nambah Beban Administrasi**

“Peraturan menteri ini hanya menambah beban birokratisasi administrasi baru dengan segala ketentuan perizinan dan belum menampakkan satu klausulupun yang bisa memastikan proses hukum berjalan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual.”



**Fikri: Seharusnya Kita Tolak Budaya Seks Bebas**

“Sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi moral agama, nilai Pancasila dan berketuhanan yang maha esa, sudah seharusnya kita tolak budaya seks bebas



**Sakinah : Dapat berimbas pada Tugas Pokok PT**

“Semakin menumpuk tugas yang dibebankan perguruan tinggi dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sehingga tujuan utama Perguruan Tinggi tidak tercapai.”



**Fahmy: Harus Sejalan dengan Pasal 31 UUD 45**

“Permendikbud ini harus sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,”



**Almuzammil: Nodai Amanat Konstitusi**

“Saya yakin maksud Saudara Menteri Nadiem ingin menghilangkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun tanpa sadar Saudara Menteri sesungguhnya telah menodai amanat luhur Pancasila; Konstitusi, budaya bangsa & Norma Agama.”



**HNW: Sudah Sewajarnya Presiden menegur Menteri**

“Sudah sewajarnya Presiden Jokowi menegur Mendikbudristek secara tegas dan terbuka supaya tidak dipahami bahwa berbagai kesalahan itu adalah visi misi Presiden.”



**Mufida: Kebijakan Yang Tidak Benar**

“Melarang dampak seks bebas tapi tidak melarang seks bebas itu sendiri jelas satu kebijakan yang tidak benar”

Pemerintah Siapkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun

## Politisi PKS: **Pastikan** Berjalan Sesuai Prosedur dan Aman

### KUTIPAN

Jakarta (07/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menyambut baik upaya Pemerintah menyiapkan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun.

"Pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun ini sangat krusial dilakukan di tengah pelanggaran kebijakan PPKM. Pastikan vaksinasi anak berjalan sesuai prosedur dan aman," kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu, (07/11).

Menurut Netty, anak-anak rentan terpapar saat berada di area publik, seperti, saat mengikuti PTM di sekolah, saat masuk mall dan berwisata bersama orangtua ataupun kegiatan lainnya.

"Sebaliknya, anak pun dapat menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi siapkan vaksinasi untuk cluster ini dengan cara yang tidak menimbulkan eksek, semisal resistensi dari orangtua ataupun kalangan pemerhati anak," katanya.

Netty juga mengingatkan

pemerintah agar mempertimbangkan dengan matang terkait jenis vaksin yang digunakan, dosis dan rentang waktu penyuntikan 1 dan 2 yang aman untuk anak.

"Anak dengan penyakit penyerta juga perlu mendapat perhatian khusus. IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) merekomendasikan agar imunisasi untuk anak dengan kanker dalam fase pemeliharaan, penyakit kronis atau autoimun yang terkontrol dapat mengikuti panduan imunisasi umum dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya," katanya.

Selain itu Netty meminta Pemerintah bisa memastikan ketersediaan vaksin dari mulai pengadaan hingga penyuntikan.

"Pastikan stok vaksin

tersedia atau setidaknya pemerintah sudah punya skema pengadaannya. Begitu juga dengan distribusi dan manajemen pengelolannya. Jangan sampai vaksin kadaluwarsa dan terbuang sia-sia sebagaimana yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu" katanya.

Munculnya kejadian pasca imunisasi, kata Netty juga perlu dimitigasi sejak awal.

"Kita tidak ingin program vaksinasi anak yang dilakukan guna membangun kekebalan komunitas malah menjadi blunder karena adanya pengabaian prosedur," ungkapnya.

Terkait waktu dan wilayah sasaran, Netty mengingatkan pemerintah agar vaksinasi anak dilakukan setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional melebihi 70 persen dari total sasaran target vaksinasi.

"Pastikan pula agar dilakukan setelah minimal 60 persen populasi lansia telah divaksin. Lakukan pula di daerah dengan indikator terpenuhi tersebut sehingga menjadi role model bagi daerah lain," ujarnya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Anak-anak rentan terpapar saat berada di area publik, seperti, saat mengikuti PTM di sekolah, saat masuk mall dan berwisata bersama orangtua ataupun kegiatan lainnya. Sebaliknya, anak pun dapat menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi siapkan vaksinasi untuk cluster ini dengan cara yang tidak menimbulkan eksek, semisal resistensi dari orangtua ataupun kalangan pemerhati anak"

# Nasir Djamil: Kalau Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Benar, Itu **Mengkhianati** Pancasila

## **KUTIPAN**

Jakarta (05/11) — Dugaan praktik pejabat ikut terlibat dalam bisnis tes PCR dinilai telah mengkhianati hati rakyat. Sebab, mereka justru mengeruk untung di saat rakyat sedang menderita akibat pandemi.

“Kalau isu ini benar, sungguh menyakitkan. Sebab itu bukan saja mengkhianati sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga seperti orang menari di atas penderitaan orang lain,” tegas anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/11).

Politisi PKS itu mengatakan bahwa seharusnya para penegak hukum memiliki hati nurani untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut agar masyarakat bisa tenang.

“Termasuk bisa menghindari pembunuhan karakter nama menteri yang

disebutkan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan dengan turunnya penegak hukum maka masyarakat akan mengetahui kebenaran dari isu yang berkembang liar tersebut.

“Secara kasat mata tentu kita sulit memastikan isu itu. Tapi dengan kewenangannya, aparat penegak hukum bisa memulai guna menjawab kegunaan publik soal isu menteri berbisnis PCR,” ucapnya.

“Sebab isu ini seperti kata pepatah, mencari kesempatan dalam kesempatan,” demikian Nasir Djamil.



**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**  
Anggota Komisi III DPR RI

Seharusnya para penegak hukum memiliki hati nurani untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut agar masyarakat bisa tenang. Termasuk bisa menghindari pembunuhan karakter nama menteri yang disebutkan”

## Launching Lomba Biografi Tokoh

# Ketua FPKS: Bukti PKS Terdepan Jaga Komitmen Kebangsaan

### KUTIPAN

Jakarta (09/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang diadakan secara virtual menyampaikan bahwa lomba tersebut merupakan bentuk komitmen keluarga besar PKS untuk mengukuhkan nilai kebangsaan.

“Kita perlu untuk terus para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan NKRI yang kita cintai. Mereka tidak hanya mengorbankan harta dan keringat, namun juga mengalirkan darah bahkan melepas nyawa demi kemerdekaan Indonesia.”  
Tukas Anggota Komisi I DPR RI tersebut pada Selasa siang (09/11).

Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa tersebut dilatarbelakangi oleh setidaknya tiga alasan, yakni untuk mengokohkan nilai kebangsaan, agar putra putri Indonesia memahami sejarah perjalanan bangsa serta untuk meneladani perjuangan mereka.



Fraksi PKS saat ini juga menjadi satu-satunya partai yang mendorong dan memperjuangkan Rahmah El Yunusiyah mendapat gelar pahlawan nasional melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Ruh perjuangan para pahlawan harus dijiwai oleh seluruh anak bangsa. Tidak boleh ada mata rantai yang terputus. Apapun posisi kita, apalagi para pengelola negara,

pejabat negara, baik yang duduk yang di eksekutif, legislatif ataupun di lembaga lain.” Ujar politisi PKS ini memaparkan.

Lebih lanjut lagi, Jazuli juga menyampaikan bahwa dengan memahami ruh perjuangan mereka, maka kita akan paham apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara, bukan apa yang telah kita ambil. Apabila semua rakyat memiliki pola pikir yang sama, maka Jazuli yakin bahwa setiap persoalan yang dihadapi oleh rakyat akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli juga menyampaikan arahan Ketua Majelis Syuro terkait refleksi pelaksanaan lomba agar PKS dapat terus menunjukkan komitmen kerakyatan yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya mengetuk pintu rakyat jelang pemilu, dan mengabaikan suara mereka pasca pemilihan.

“Fraksi PKS akan terus berjuang untuk menjadi garda terdepan menunjukkan komitmen kebangsaan PKS



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Fraksi PKS akan terus berjuang untuk menjadi garda terdepan menunjukkan komitmen kebangsaan PKS agar bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh, kuat, dan mampu bersaing dengan negara lain.”

agar bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh, kuat, dan mampu bersaing dengan negara lain.”  
Tekad legislator Dapil Banten III tersebut.

Jazuli mengutip laporan survey tahun 2020 yang menunjukkan bahwa index kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di tingkat ke-50. Sehingga untuk mewujudkan harapan pada bangsa ini

menjadi PR besar bagi Indonesia. Para ‘stakeholder’ harus turut berkontribusi memajukan bangsa.

“Mudah-mudahan, melalui lomba ini, PKS dapat memberikan manfaat besar meskipun baru dapat dilaksanakan secara virtual, namun semoga manfaatnya melingkupi seluruh ruang publik.” Pungkas Jazuli.



# Lanjutkan Tradisi Kepahlawanan, **Salim Segaf: Semua Bisa Jadi Pahlawan Masa Kini**

## KUTIPAN

Jakarta (10/11) — Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri meresmikan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa Tingkat Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa 9/11.

Salim mengapresiasi gelaran Fraksi PKS ini sebagai upaya untuk mengkokohkan semangat kebangsaan dan penghormatan kepada para pahlawan.

"Lomba ini terkesan sederhana tapi mengajak generasi mudah semakin mengenal para pahlawan hingga akhirnya dapat meneladani semangat kepahlawanan mereka dalam ruang dan dimensi perjuangan saat ini," ungkap Salim.

Menteri Sosial RI 2014-2019 ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan tradisi kepahlawanan dengan tampil dan hadir sebagai pahlawan-pahlawan masa kini dihadapkan pada problematika bangsa yang begitu banyak dan



**Lomba  
PIDATO  
BIOGRAFI  
TOKOH  
BANGSA**

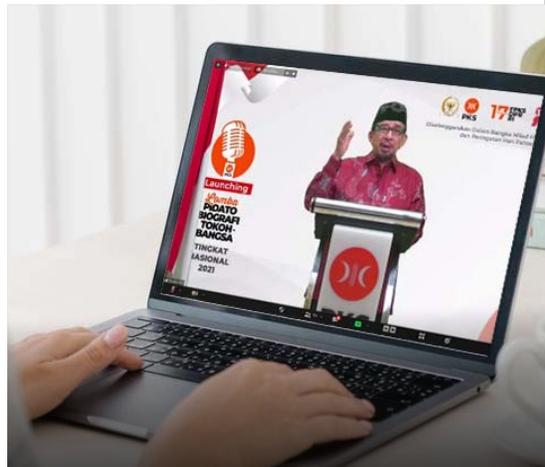
harus diselesaikan.

Panggilan sejarah kita hari ini adalah menghadirkan kepahlawanan masa kini

dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini masih berjuang untuk lepas dari berbagai masalah ketimpangan, ketidakadilan, akses pelayanan, kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain," ungkap Salim.

Pahlawan masa kini tidak akan diam melihat berbagai problematika bangsa, mereka akan aktif mengambil peran, bertindak nyata dengan prestasi, karya dan manfaat serta memberi solusi dengan semangat gotong royong, kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan bangsa.

"Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera terus membuka diri untuk bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa guna mendorong kebijakan negara yang berkeadilan dan berkemajuan serta menghadirkan solusi fundamental atas berbagai permasalahan dan tantangan kebangsaan," pungkas Salim.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Panggilan sejarah kita hari ini adalah menghadirkan kepahlawanan masa kini dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini masih berjuang untuk lepas dari berbagai masalah ketimpangan, ketidakadilan, akses pelayanan, kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain"



# Dr. Salim: Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional Sarana Lanjutkan Tradisi Kepahlawanan

## KUTIPAN

Jakarta (9/11) — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Salim Segaf Aljufri, mengapresiasi kiprah PKS pusat dan daerah melalui pelaksanaan Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional sebagai terobosan pengokohan semangat kebangsaan dan kecintaan akan Tanah Air.

la menyampaikan hal tersebut dalam acara Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa Tingkat Nasional 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (9/11/2021) siang. Acara ini digelar dalam rangka memperingati milad Fraksi PKS DPR RI ke-17 sekaligus Hari Pahlawan.

“Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional ini adalah bagian dari panggilan tanggung jawab dan kepedulian FPKS untuk mengenalkan para pahlawan bangsa khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Mantan Direktur Perwakilan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) untuk Kawasan



**Lomba  
PIDATO  
TOKOH  
BANGSA**

Asia Timur dan Asia Tenggara tersebut.

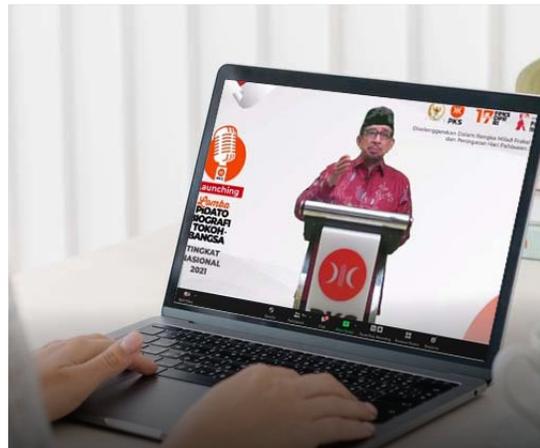
Dr. Salim berharap bahwa lomba ini, meskipun terkesan sederhana, dapat menjadi penggerak bagi kaum muda untuk membaca, mengenal, dan menghormati, menghargai, dan meneladani para pahlawan di tengah konteks perjuangan dan pengorbanan masa kini.

la juga menyampaikan bahwa lomba ini merupakan

wujud pelaksanaan panggilan sejarah yang dilakukan PKS dalam melanjutkan tradisi kepahlawanan bangsa sebagai penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

“Kita semua bisa menjadi pahlawan masa kini, tidak dengan kata-kata, tapi dengan karya dan tindakan nyata, menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional dan seimbang, dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen, menjadi manusia yang taat beragama, mencintai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, membangun kebersamaan dan gotong royong, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Dr. Salim.

Mantan Menteri Sosial tersebut melanjutkan bahwa banyak problematika yang masih harus dihadapi bangsa ini, mulai dari pandemi Covid-19, kemiskinan, kualitas SDM, ketidakadilan, ketimpangan



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

“Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional ini adalah bagian dari panggilan tanggung jawab dan kepedulian FPKS untuk mengenalkan para pahlawan bangsa khususnya di kalangan generasi muda”

ekonomi, ketidakmerataan pelayanan publik, dan mewujudkan demokrasi dan kebebasan yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kita harus

bergandengan tangan, gotong royong, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk menuntaskannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Lomba Biografi Tokoh Nasional

# HNW: PKS beri Aksi Konkrit Cinta Negara

## KUTIPAN

Jakarta (9/11) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi segala kegiatan PKS yang selalu menghadirkan semangat yang selalu konsisten dengan menghadirkan Lomba Pidato Biografi Nasional,

sebagai bentuk Memperingati Hari Pahlawan. Ia Menyampaikan hal tersebut dalam acara Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (9/11) Siang.

“PKS selalu menghadirkan kegiatan terbuka dan melibatkan tokoh yang sangat beragam”, Ujar Hidayat.

Lomba Biografi tersebut hadir sebagai upaya membuktikan bahwa partai politik bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi melainkan kepentingan umat, agama, dan bangsa.

“PKS selalu memberi Aksi Konkrit, salah satunya memperingati Hari Pahlawan dari berbagai Latar Belakang”, Ujar Hidayat.



**Lomba  
PIDATO  
TOKOH  
BANGSA**

Dengan Adanya Lomba Biografi Tokoh Nasional diharapkan agar para generasi Milenial dan generasi Z dapat memahami secara mendalam makna dari Pahlawan yang sudah berjuang.

“PKS lagi-lagi memberi bukti bahwa dirinya komunitas untuk semuanya, semua boleh terlibat salah satunya pemberian vaksin secara gratis.” Ungkap Hidayat.

Seperti yang diketahui bahwa Lomba Biografi Tokoh Nasional akan dilombakan dengan menghadirkan berbagai keragaman.

“Pendekatan yang dilakukan PKS untuk menyatukan bukan membelah”, Tegas Hidayat

Wakil Ketua MPR RI tersebut juga menyampaikan bahwa tokoh yang akan dilombakan dari berbagai latar belakang, hal tersebut bertujuan agar para peserta tidak hanya menghapuskan akan tetapi mengilhami nilai-nilai yang dapat di internalisasi dan diaktualisasi guna menambah rasa cinta kepada negara.

“PKS tidak pernah surut walau di bully, tapi tidak Jemawa ketika Dipuji. Kegiatan ini bentuk upaya untuk selalu mengingat jasa dari para pahlawan dan mengingat sejarah.” Tutup Hidayat



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

“PKS selalu menghadirkan kegiatan terbuka dan melibatkan tokoh yang sangat beragam. PKS selalu memberi Aksi Konkrit, salah satunya memperingati Hari Pahlawan dari berbagai Latar Belakang.



# Peringatan Hari Pahlawan, **HNW Ingatkan** **Generasi Milenial** agar Pandemi Tak Surutkan Spirit Kepahlawanan

## ● KUTIPAN

Jakarta (10/11) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengajak generasi muda (milenial) dan masyarakat umum untuk tidak meninggalkan laku dan semangat kepahlawanan sekalipun sedang berada di dalam kondisi pandemi covid-19.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan bahwa satu abad yang lalu Indonesia juga diserang pandemi yakni Flu Spanyol, yang menurut data *Burgerlijke Geneeskundige Dienst/BGD* pada zaman kolonial, telah menewaskan lebih dari satu juta orang di Hindia Belanda.

"Namun justru dalam bayang pandemi dan perjuangan lepas dari penjajahan Belanda, para pemuda justru bisa memaksimalkan potensi,



**Lomba  
PIDATO  
TOKOH  
BANGSA**

menghimpun diri dalam Persatuan Indonesia, menghadirkan Kongres Pemuda Indonesia dan Kongres Perempuan Indonesia, sebagai pilar sangat penting menuju kemerdekaan Indonesia yang kemudian digawangi oleh BPUPKI, Panitia Sembilan, dan

PPKI," terang HNW.

Para Pemuda dengan tokoh sentral Bung Tomo, imbuhnya, melanjutkan peran itu, termotivasi oleh Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari (22/10/1945), dengan pekikan 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merdeka!', menyemangati arek-arek Suroboyo dan menyelamatkan Indonesia dari kembalinya penjajah Belanda. Peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 itu oleh Presiden Soekarno melalui Keppres 316/1959 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

"Mereka memberikan keteladanan nyata, menjadi Pahlawan bangsa dalam momen penuh tantangan mempersiapkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, justru saat mereka bertemu dengan kondisi Pandemi Flu Spanyol dan penjajahan Belanda. Oleh karena itu pandemi covid-19 dan kekhawatiran terjadinya 'neo-kolonialisme' saat ini juga mestinya bisa menghadirkan spirit dan para pahlawan dari kalangan Pemuda (generasi milenial) yang menyelamatkan Indonesia, dan membawa Indonesia menuju kejayaannya pada momen 1 Abad Kemerdekaan di tahun 2045 nanti," ujar Hidayat dalam sambutannya pada kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan dan Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

"Seharusnya Partai Politik, bukan sekedar berkegiatan untuk mencari kekuasaan dan berkompetisi melalui Pemilu, namun juga serius melakukan peran edukasi dan advokasi dengan menghadirkan semangat kebangsaan yang merujuk pada aktivitas keteladanan dan kepahlawanan para tokoh bangsa"

Bangsa Tingkat Nasional Fraksi PKS DPR-RI, Selasa (09/11/2021).

Acara itu dihadiri juga oleh Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufrie, Presiden PKS H. Ahmad Syaikh, Ketua Fraksi

PKS DPR-RI Jazuli Juwaini, Budayawan Sudjiwo Tejo, Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Anggota Fraksi PKS dan seluruh struktur PKS dari pusat hingga daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Siti Zuhro Apresiasi Fraksi PKS Inovatif dalam Kegiatan Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional

## KUTIPAN

Jakarta (09/11) — Ahli Peneliti Utama BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro mengapresiasi Fraksi PKS sebagai Lead inovatif dan kreatif atas Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa Tingkat Nasional 2021 yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Fraksi PKS DPR RI pada Selasa (9/11).

Acara ini digelar secara virtual dan dalam rangka memperingati Milad Fraksi PKS DPR RI ke-17.

"Saya mengucapkan selamat atas Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang menurut Saya PKS DPR RI sangat luar biasa, kreatif, inovatif, dan progresif", ujar Ahli Peneliti Utama BRIN.

Terdapat tiga ancaman terbesar dalam kedaulatan NKRI, yaitu terkait masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Dimana jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru, khususnya karena faktor ekonomi.

"Tidak hanya Covid-19



**Lomba  
PIDATO  
TOKOH  
BANGSA**

yang memberikan dampak dahsyat terhadap sosial ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Tetapi pelaksanaan otonomi daerah pilkada juga menyebabkan dampak dahsyat, yaitu kemiskinan dan pengangguran dimana daerah-daerah belum mampu muncul sebagai klaster ekonomi baru", pungkash Siti dalam acara Launching Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa Tingkat

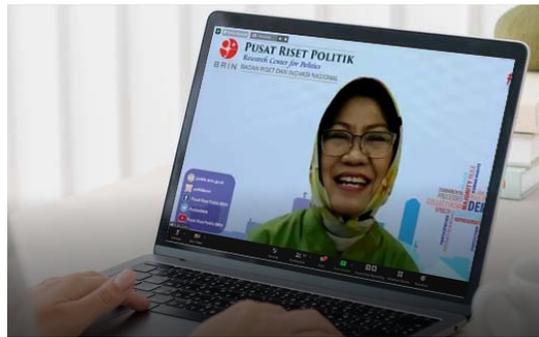
Nasional 2021.

Salah satu contoh ancaman NKRI lainnya adalah saat Covid-19 melanda saat ini, terdapat segelintir orang kaya yang memiliki mental bak "pengemis". Memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan di saat kondisi sulit, karena memiliki hasrat semakin kaya semakin merasa tak cukup.

"Oleh karena itu kita harus fokus untuk mencari cara bagaimana mencerdaskan rakyat. Bagaimana membuat masyarakat itu nantinya menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang kritis dalam Pemilu dan Pilkada", ujar Siti.

Mengenai ironi demokrasi, Ahli Peneliti Utama BRIN itu menambahkan bahwa sila pertama Pancasila hanya menghasilkan kesolehan pribadi dan jauh dari kesolehan sosial, "change from within" akan sulit terjadi.

"Karena kita tidak mampu mewujudkan kesalehan pribadi, sehingga kita menjauhi dari kesolehan sosial dan hal tersebut dikarenakan empati kita terhadap kesulitan yang kita", tegas Siti.



**Prof. Dr. SITI ZUHRO, MA**  
Ahli Peneliti Utama BRIN

"Salah satu contoh ancaman NKRI lainnya adalah saat Covid-19 melanda saat ini, terdapat segelintir orang kaya yang memiliki mental bak "pengemis". Memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan di saat kondisi sulit, karena memiliki hasrat semakin kaya semakin merasa tak cukup. Oleh karena itu kita harus fokus untuk mencari cara bagaimana mencerdaskan rakyat. Bagaimana membuat masyarakat itu nantinya menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang kritis dalam Pemilu dan Pilkada",

## Lomba Pidato Tokoh Bangsa

# Sujiwo Tejo: Cara baru PKS Memperkenalkan Tokoh Pahlawan pada masa kini

### KUTIPAN

Jakarta (9/11) – Budayawan Sujiwo Tejo mengapresiasi Lomba Pidato Tokoh Bangsa yang diselenggarakan Oleh Fraksi PKS di saat wawasan kebangsaan yang semakin memudar diantara para generasi muda

Hal ini disampaikan secara virtual dalam webinar Pembukaan acara Lomba Pidato Biografi para Tokoh Bangsa yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pahlawan sekaligus Milad Fraksi PKS DPR-RI yang ke -17 pada Selasa (09/11/2021).

“Harus diakui bahwa semakin kesini, pahlawan semakin membosankan, harus kita jujur itu, apalagi bagi generasi Z dan juga generasi Millenial karena menggunakan pendekatan yang itu-itu saja” tutur budayawan asal Jember tersebut

Ia pun memuji Fraksi PKS DPR-RI yang mengadakan acara lomba pidato tokoh bangsa ini sebagai cara baru dalam memperkenalkan Kembali nilai-nilai kepahlawanan kepada



## Lomba PIDATO TOKOH BANGSA

generasi Muda.

Pada kesempatan ini juga, Sujiwo Tejo juga sempat mengkritisi perilaku para tokoh politik yang menggunakan Kalimat “Demi Bangsa dan Negara” yang dianggapnya kurang tepat

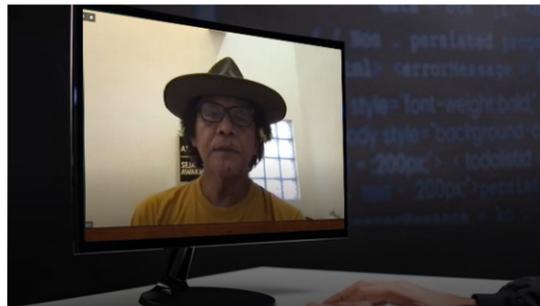
untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan masa kini

“Kalo bisa saya titip pesen, tokoh-tokoh jangan bilang seperti itu, nanti diketawain ayam . karena ga percaya wong mereka kaya sendiri, punya mobil lebih dari 30, punya tambang dimana-mana “ tutur Sujiwo Tejo.

Lebih lanjut, Sujiwo juga mengkritik para tokoh yang dianggap mengambil kesempatan di saat banyak masyarakat yang kesulitan dan jauh dari nilai-nilai kepahlawanan yang patut untuk diteladani.

“Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang bikin kebijakan dan kau yang punya bisnis PCR, itu gimana ? orang-orang akan ketawa nanti melihat kebijakan itu “ lanjut kritik dari Presiden Jancukers tersebut.

Meskipun sangat mengapresiasi acara tersebut, namun Sujiwo Tejo tetap memberikan beberapa usulan seperti meminta kepada para juri agar nantinya menitikberatkan penilaian kepada bagaimana peserta mendapatkan Turning Point dari



**SUJIWO TEJO**  
Budayawan

“Saya usulkan bahwa penilaian terbesar untuk dewan juri adalah para pidatowan dan pidatowati yang sanggup menyampaikan Turning Point seseorang menjadi nasionalis. Bagaimana pak Kyai Hashim jadi nasionalis, bagaimana Ahmad Dahlan menjadi Nasionalis, bagaimana Bung Karno menjadi Nasionalis

hasil melihat , memahami dan memaknai karakter tokoh yang diperankan nantinya .

“saya usulkan bahwa penilaian terbesar untuk dewan juri adalah para pidatowan dan pidatowati yang sanggup menyampaikan Turning Point seseorang menjadi nasionalis.

Bagaimana pak Kyai Hashim jadi nasionalis, bagaimana Ahmad Dahlan menjadi Nasionalis, bagaimana Bung Karno menjadi Nasionalis “ Pungkas Sujiwo.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Komisi I Yakin Andika Perkasa Mampu Bawa TNI Lebih Profesional

**KUTIPAN**

Jakarta (07/11) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional.

Meskipun, rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan, sebelum memasuki masa pensiun.

"Saya yakin Pak Andika dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," ujar Kharis kepada awak media, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Diketahui, hari ini Sabtu (6/11/2021), Komisi I DPR RI menggelar RDPU dengan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

Kharis menekankan RDPU akan lebih mendalam pemahaman calon Panglima

TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. "Ya pasti sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi panglima TNI, sesuai dengan UU TNI tu kita akan dalam seperti apa calon panglima TNI kita ini," tambah politisi PKS ini.

Kharis meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19. "PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain,"

# Pertanyaan Anggota FPKS Terkait Rencana Perubahan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002

## KUTIPAN

Jakarta (12/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul mengajukan tiga pertanyaan terkait rencana pembuatan RUU tentang Perubahan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Hal itu disampaikan Syaikhul dalam Kunjungan Kerja (Kun-ter) Komisi I DPR RI di Sumatera Utara, Kamis (11/11).

Pertanyaan pertama Syaikhul sampaikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI. Menurutnya, semangat UU 32 tahun 2020 tentang Penyiaran adalah untuk menjaga integrasi nasional, memajukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah.

"Karena itu, perlu dibentuk lembaga penyiaran yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Semangat semacam ini,

imbuh Syaikhul, tentunya masih sangat relevan. Tapi perlu kita lengkapi dengan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI.

"Sebab, dengan Era Digital saat ini, penetrasi informasi dan konten-konten dari luar negeri akan semakin mudah diakses, hampir tak terbendung. Sangat penting bagi kita untuk untuk membuat regulasi yang ketat dan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi dalam RUU yang akan kita buat. Dengan harapan ada filter informasi yang kokoh bagi kita untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara," terang Syaikhul.

Dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Bab IV Pasal 36 Ayat 1 dan 2 berbunyi:

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan,

hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

"Jika kita melihat perkembangan teknologi informasi yang sebagai gelombang tsunami ini, seperti kita harus sama-sama sepakat untuk meningkatkan ambang batas konten dalam negeri hingga 80% Apakah ini bisa kita lakukan?" tanya Syaikhul.

Pertanyaan kedua Syaikhul arahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara. Mengutip data dari KPI Pusat, Syaikhul menyampaikan sepanjang 2020, ada 920 potensi pelanggaran oleh lembaga penyiaran yang ada di dalam negeri. Jumlah itu



**H. AHMAD SYAIKHU**

Anggota Komisi I DPR RI

"Jika kita melihat perkembangan teknologi informasi yang sebagai gelombang tsunami ini, seperti kita harus sama-sama sepakat untuk meningkatkan ambang batas konten dalam negeri hingga 80% Apakah ini bisa kita lakukan?"

berasal dari 306 program siaran yang ditayangkan di Indonesia. Di Tanah Air, ada 16 induk jaringan televisi yang ada di Indonesia. Dari 16 jaringan induk tersebut, rata-rata per hari memiliki sebanyak 15 program siaran. Dalam sehari, masyarakat memiliki kurang lebih sebanyak 240 program

alternatif yang disiarkan. Jika produk siaran ada 240 sehari dan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran sebanyak 920 dalam satu tahun, artinya ada potensi pelanggaran 1 persen per hari.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# PKS Minta Jenderal Andika Waspadai Serangan Siber-Biotek Saat Jadi Panglima

## KUTIPAN

PKS mengingatkan Andika Perkasa soal tatanan politik dalam negeri, pertahanan keamanan regional dan internasional. Muzammil mengatakan saat ini dibutuhkan kepemimpinan TNI yang bijak.

Jakarta (05/11) -- PKS menyampaikan sejumlah pesan kepada Jenderal Andika Perkasa, yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Panglima TNI. PKS meminta Andika waspadai ancaman baru bagi negara.

"Pimpinan TNI harus fokus pada tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan konstitusi negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," kata Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf kepada wartawan, Rabu

(3/11/2021) malam.

PKS mengingatkan Andika Perkasa soal tatanan politik dalam negeri, pertahanan keamanan regional dan internasional. Muzammil mengatakan saat ini dibutuhkan kepemimpinan TNI yang bijak.

"Konstelasi politik dalam negeri serta hankam regional dan internasional semakin menuntut hadirnya kepemimpinan TNI yang kuat, bijak, dan cerdas. Sehingga TNI di tengah konstelasi politik dan hankam yang menantang tersebut tetap dipersepsi dan dirasakan benar-benar mengayomi seluruh komponen masyarakat dan mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa

terkecuali," ujar Muzammil.

"Panglima TNI juga perlu mengantisipasi tantangan perang modern yang berbentuk serangan siber dan biotek," imbuh anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Rekan Muzammil di DPR, Sukamta, menilai Jenderal Andika Perkasa cocok menjawab tantangan pertahanan keamanan. Sukamta mengingatkan tantangan keamanan berasal dari dalam luar negeri.

"Beliau memang yang paling senior dari semua kepala staf. Jenderal Andika juga cocok dengan tantangan situasi pertahanan keamanan saat ini, baik tantangan dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya.



**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Komisi I DPR RI

"Konstelasi politik dalam negeri serta hankam regional dan internasional semakin menuntut hadirnya kepemimpinan TNI yang kuat, bijak, dan cerdas. Sehingga TNI di tengah konstelasi politik dan hankam yang menantang tersebut tetap dipersepsi dan dirasakan benar-benar mengayomi seluruh komponen masyarakat dan mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali"

# Wakil Ketua FPKS Beberkan Tiga Pekerjaan Rumah Panglima TNI

## KUTIPAN

"Saya ucapkan selamat atas amanah baru sebagai panglima TNI. Banyak harapan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI. Semoga masa jabatan singkat selama 1 tahun 1 bulan bisa dioptimalkan".

Jakarta (08/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, menyatakan calon Panglima TNI punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pesan ini disampaikan Sukamta kepada Jendral Andika Perkasa Panglima TNI yang baru saja di-setujui DPR RI setelah rangkai-an uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya ucapkan selamat atas amanah baru sebagai panglima TNI. Banyak harapan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI. Semoga masa jabatan singkat selama 1 tahun 1 bulan bisa dioptimalkan".

Anggota Komisi I DPR RI ini memberikan beberapa catatan pekerjaan rumah untuk diselesaikan oleh panglima TNI yang baru.

"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Dua wilayah ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat," ungkap Sukamta.

Kedua, imbuhnya, pertahanan siber dan bawah laut. Beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berungki bobol. Hacker membobol situs-situs pemerintah, mengambil data-data strategis negara. Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI

yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah ini.

"Ketiga, meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan isi tas anggota TNI. Isi tas atau kesejahteraan yang memadai harapannya bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI. Jangan ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alutsistanya yang tengah berjuang di garda depan pertahanan negara. TNI harus terus memperkuat dan memelihara alutsista pertahanan dengan baik. Selain itu harus mengedepankan industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Anggota DPR RI asal dapil DI Yogyakarta ini juga memberikan peringatan kepada Panglima TNI yang baru agar fokus pada tupoksinya dan tidak ikut terseret oleh hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024.



**H. SUKAMTA, Ph.D.**  
Anggota Komisi I DPR RI

“Meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan isi tas anggota TNI. Isi tas atau kesejahteraan yang memadai harapannya bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI. Jangan ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alutsistanya yang tengah berjuang di garda depan pertahanan negara”

# MA Cabut Aturan Pengetatan Remisi Koruptor, PKS: Akan Marak Obral

## KUTIPAN

Jakarta (03/11) --- Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut aturan pengetatan remisi koruptor menuai kritikan dari berbagai pihak. Langkah MA itu justru akan menimbulkan obral remisi terhadap koruptor.

Demikian disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Dia menilai, putusan ini bisa menyebabkan maraknya pemberian remisi terhadap koruptor di masa yang akan datang.

Menurut dia, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka itu, sebaiknya tidak boleh dipermudah mendapatkan remisi.

"Dihapusnya syarat pemberian remisi bagi koruptor bisa membuat maraknya obral remisi di masa yang akan datang. Kasus korupsi dalam berbagai aturan masuk kategori kejahatan luar biasa sehingga mesti ada pengetatan. Kian menurun semangat

pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Mardani, Selasa 2 November 2021.

Mardani mengatakan, PP tersebut seharusnya bisa dijadikan upaya terakhir untuk penegakkan hukum. Melalui PP ini, bisa membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan korupsi.

"Harusnya ketentuan PP itu diletakkan sebagai upaya terakhir bagi usaha penegakkan hukum untuk mengurangi keberanian melakukan korupsi. Pertimbangan MA tentang unsur kekhilafan dalam kasus korupsi juga mengada-ada," jelas Mardani



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

"Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka itu, sebaiknya tidak boleh dipermudah mendapatkan remisi.

Dihapusnya syarat pemberian remisi bagi koruptor bisa membuat maraknya obral remisi di masa yang akan datang.

Kasus korupsi dalam berbagai aturan masuk kategori kejahatan luar biasa sehingga mesti ada pengetatan. Kian menurun semangat pemberantasan korupsi di negeri ini," kata

# Legislator PKS: Masih Banyak Polisi yang Bekerja dengan Baik

## KUTIPAN

Jakarta (30/10) – Legislator Fraksi PKS Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendukung sikap tegas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam menindak pimpinan di jajaran Polri yang tidak bisa menjadi teladan bagi anggotanya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam segmen Indonesia Menyapa Pagi yang disiarkan RRI pada Sabtu (30/10) lalu.

“Sikap tegas ini, saya melihat, beliau tidak anti-kritik dan berusaha bersifat korektif. Ada kesadaran bahwa ada oknum yang nakal, tapi jangan sampai yang nakal ini seenaknya merusak reputasi lembaga, sedangkan banyak unit Polri yang bekerja dengan baik, kok,” ungkapnya.

Terkait skala prioritas yang semestinya dilakukan Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Habib mengusulkan dua hal yang berfokus pada penindakan tindak indisipliner. Pertama, pembinaan spiritualitas melalui pengajian rutin atau ceramah rohani. Kedua, optimalisasi

mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan internal.

“Yang pastinya, mekanisme reward and punishment perlu dikuatkan, itu pertama. Sehingga, mana polisi yang baik dan mana yang melanggar aturan bisa terlihat. Saya rasa jika mekanisme tersebut dilakukan secara optimal, udah, akan dapat mengikis adanya tindakan indisipliner. Yang kedua, Polri juga harus bangun pencitraan. Ini bisa dilakukan dengan memainkan peran positif anggota di masyarakat, ditampilkan. Humasnya harus main,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu.

Pembenahan dan strategi humas merupakan hal yang

penting untuk dapat mendorong sosok polisi yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Polisi harus taat pada Tribrata dan Catur Prasetya dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

“Dalam penegakan hukum, Polri berpegang pada tiga hal. Pertama, memiliki orientasi mencari kebenaran. Yang kedua, penegakan hukum itu dilaksanakan berdasarkan keadilan. Yang ketiga, dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Polri sebagai penyidik juga tidak boleh lepas dari aspek kemanusiaan,” pungkas Habib.

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I tersebut juga terus mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan berbagai tindak penyelewengan atau indisipliner melalui media sosial atau jalur Propam Polri. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa Komisi III selaku mitra Polri juga selalu siap menerima aduan terkait institusi Polri.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

“Mekanisme reward and punishment perlu dikuatkan, itu pertama. Sehingga, mana polisi yang baik dan mana yang melanggar aturan bisa terlihat. Saya rasa jika mekanisme tersebut dilakukan secara optimal, udah, akan dapat mengikis adanya tindakan indisipliner. Yang kedua, Polri juga harus bangun pencitraan. Ini bisa dilakukan dengan memainkan peran positif anggota di masyarakat, ditampilkan. Humasnya harus main,”

# Nasir Djamil: Konsekuensi Putusan MK, Penegak Hukum Bisa Tindak Penyimpang Dana Corona

## KUTIPAN

Aceh (01/11) — Keputusan Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal kebal hukum dalam Perppu corona diapresiasi banyak pihak. Pasalnya, dalam pasal-pasal tersebut pemerintah dianggap lepas tangan dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Menyikapi hal tersebut, politisi senior PKS Muhammad Nasir Djamil berpendapat, MK kepada Kantor Berita Politik dalam memutuskan gugatan tersebut.

Dengan adanya keputusan MK tersebut, kata Nasir, maka konsekuensinya adalah BPK dan institusi penegak hukum dapat masuk melakukan penyelidikan jika dalam pengelolaannya ditemukan adanya indikasi niat tidak baik dan berpotensi merugikan negara.

"Putusan MK itu telah menghancurkan tembok tebal kebal hukum yang dijadikan tempat berlindung dalam pengelolaan keuangan negara

dalam pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi pandemi Covid-19," ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/10).

Dengan adanya keputusan MK tersebut pemerintah bisa digugat jika dalam penggunaan anggaran dana untuk penanganan Covid-19 ini mengalami penyimpangan dalam realisasinya.

Adapun lima penggugat terkait Perppu 2/2020 ini yang dikabulkan MK yakni, perkara 37/PPU-XVII/2020 yang dilayangkan YAPPIKA, kemudian perkara 43/PUU-XVIII/2020 dengan penggugat Ahmad Sabri Lubis, Munarman dkk, perkara

75/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Din Syamsuddin dkk, perkara 45/PUU-XVIII/2020 yang dilayangkan Sururudin, dan perkara 49/PUU-XVIII/2020 oleh Damai Hari Lubis.

Pasal yang digugat yakni Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2020 yang berbunyi, (1).biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. (2). Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin



**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

“Putusan MK itu telah menghancurkan tembok tebal kebal hukum yang dijadikan tempat berlindung dalam pengelolaan keuangan negara dalam pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi pandemi Covid-19”

Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktidat baik

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PERPPU ini bukan merupakan objek Gugatan yang dapat di ajukan ke pada PTUN.

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين



Diselenggarakan Dalam Rangka  
Milad Fraksi PKS DPR RI Ke-17 dan  
Hari Santri Nasional 2021



# LOMBA BACA KITAB KUNING<sup>®</sup> TINGKAT NASIONAL 2021

## KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab  
Fathul Mu'in Karya Syaikh  
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbarby

## SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2020)

## Raih Juaranya Rebut Hadiyahnya

Juara 1	<b>UMRAH (Rp 30.000.000)</b>	Juara Harapan 1	<b>Rp 15.000.000,-</b>
Juara 2	<b>Rp 25.000.000,-</b>	Juara Harapan 2	<b>Rp 10.000.000,-</b>
Juara 3	<b>Rp 20.000.000,-</b>	Juara Harapan 3	<b>Rp 5.000.000,-</b>

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh  
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI



HADIAH UTAMA  
**UMRAH**

## PENDAFTARAN

Link Pendaftaran online:  
<https://bit.ly/lbkkvirtual2021fraksipks>

## AGENDA PELAKSANAAN

**Masa Pendaftaran**  
20 Oktober - 13 November 2021  
**Babak Penyisihan** di 34 Provinsi akan diselenggarakan antara 14 November 2021 hingga 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.  
**Babak Final:** Rabu 8 Desember 2021

## NARAHUBUNG

0856-4554-6397 Agus. A. Wahid MG, Spd, M.Sc.  
0822-6062-1141 Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc.  
0813-2025-0848 Iman Sulaiman, Lc.  
0813-8642-7673 Dr. Suesilowati

## DEWAN JURI

**KH. Syuhada<sup>®</sup> Syarkun, S.Ag., M.HI.**  
(Santri Tebuireng-Jombang Jatim)  
**KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA**  
(Ketua Umum MAPADI)  
**Dr. KH. Ali Akhmad, MA, Al-Hafidz**  
(Ketua BPU-DPP PKS)



Habib **Dr. Salim** Segaf Aljufri, MA  
Ketua Majelis Syuro PKS



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI  
**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Bicara Soal Sawit, Aleg PKS: Pemerintah Harus Tindak Tegas Perusahaan Pelanggar HGU

## KUTIPAN

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, saat masuk persidangan usai reses DPR RI, mendapati kabar gembira di tengah Hasil devisa ekspor sawit yang mampu mencapai Rp 300 triliun per tahun,

Serta mampu menyerap tenaga kerja dan petani hingga 16 juta orang, akan tetapi masih ada beberapa persoalan di dalamnya termasuk adanya perusahaan yang melanggar HGU.

Menurut Akmal, Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekonomi kerakyatan. Dengan adanya kelapa sawit, infrastruktur, perekonomian, bahkan tingkat edukasi di daerah terpencil menjadi meningkat.

"Sangat disayangkan, di kawasan Papua dan Papua Barat, masih terjadi konflik lahan kelapa sawit terkait HGU. Saya minta pemerintah tidak masuk angin, atau terpengaruh dengan tindakan apapun terkait

adanya pelanggaran perusahaan yang tidak bayar pajak hingga menanam di luar izin", tutur Akmal.

Saat ini, tambah Akmal, Moratorium Sawit masih berlangsung dibawah regulasi Inpres No 8 tahun 2018.

Politisi PKS ini mengatakan, persoalan perkebunan kelapa sawit ini bukan hanya di Papua, di Jambi pun kerap di temui konflik orang rimba kerap terjadi. Pemicu utama konflik dimana orang rimba terpaksa hidup menumpang di tengah perkebunan kelapa sawit Jambi terus berlangsung.

Contoh kasus terbaru yang sudah mulai ramai adalah konflik anggota kelompok Orang

Rimba yang berujung aksi anarkis. Konflik yang menuai kerugian dari berbagai pihak ini mesti dapat di cegah di masa yang akan datang. Untuk itu, Akmal meminta pemerintah agar setiap perusahaan yang berdiri mengeksploitasi tanah Indonesia ini, mesti mampu membina orang-orang rimba yang secara turun temurun ada sejak sebelum perusahaan kelapa sawit berdiri.

"Selain Konflik di tengah perkebunan kelapa sawit antara orang rimba dan perusahaan, Petani sawit mandiri mesti dapat perlindungan terhadap persoalan harga. Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, sawit dihargai Rp.1800,-. Alasannya klasik persoalan biaya transportasi jempot dan kualitas. Padahal Petani ini kan sudah pakai bibit yang unggul dan merawat sawitnya dengan sebaik-baiknya", tutur Akmal.

Selain itu, lanjut Akmal, keberlangsungan petani sawit saat ini terancam dengan tingginya harga pupuk. Kenaikan harga pupuk merata 60%-120% dalam 8 bulan



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya khawatir, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat mengalami kendala besar karena persoalan pupuk ini. Pemerintah mesti memberi perhatian terkait persoalan pupuk untuk sawit ini, mengingat devisa dari sawit untuk negara ini per tahun mencapai ratusan triliun

terakhir telah melewati batas kewajaran karena lebih tinggi daripada harga TBS sawit.

"Saya khawatir, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat mengalami kendala besar karena persoalan pupuk ini. Pemerintah mesti memberi perhatian terkait persoalan

pupuk untuk sawit ini, mengingat devisa dari sawit untuk negara ini per tahun mencapai ratusan triliun. Jangan sampai kondisi ini, di masa yang akan datang mempengaruhi terhadap penerimaan negara", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Ingatkan Menteri LHK, Aleg PKS: Fungsi Hutan Bukan Hanya untuk Carbon Sink

## KUTIPAN

Jakarta (05/11) — Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang akan tetap melanjutkan Deforestasi (penggundulan hutan) demi pembangunan merupakan pernyataan kontra produktif dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membanggakan turunnya laju deforestasi melalui turunnya kasus Karhutla dan rehabilitasi hutan mangrove besar-besaran sebagai 'Carbon Net Sink'.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Slamet mengingatkan bahwa fungsi hutan bukan hanya sebagai Carbon Sink (penyerap karbon) dari atmosfer dalam rangka menurunkan suhu bumi, tapi hutan adalah habitat makhluk hutan, flora dan fauna yang menyusun ekosistem dunia menjadi seimbang.

"Jika hutan hanya dianggap sebagai Carbon Sink maka yang terjadi adalah hutan digunduli (deforestasi) lalu

ditukar dengan penanaman mangrove. Lalu semua flora dan fauna langka Indonesia beserta ekosistemnya musnah dan kita tidak tau bencana kemanusiaan apa yang akan terjadi. Sudah jelas banjir akan melanda daerah sekitarnya karena tak ada lagi pohon-pohon besar penyerap air," ujar Slamet di Jakarta, Jum'at (05/11).

Sepanjang hutan yang hilang akibat karhutla tidak kembali menjadi hutan, tegas

Slamet, maka itu merupakan indikasi Pemerintah terlibat atas deforestasi yang terjadi.

"Pemerintah bertanggung-jawab untuk merinci dan mengembalikan seluruh flora dan fauna yang musnah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran sebelumnya," tandasnya.

Menurut Slamet, pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan bekas karhutla jelas memperlihatkan arah pembakaran hutan kemana.

"Jika perkebunan kelapa sawit mendatangkan keuntungan besar lalu kenapa pekerja perkebunan kelapa sawit jauh dari kondisi sejahtera. Jika penanaman mangrove yang mengurus APBN dapat menghasilkan devisa 'Carbon Credit' lalu kenapa pemerintah memunculkan 'Carbon Tax'?", tanya Slamet.

Politisi senior PKS ini kembali menegaskan bahwa memang Carbon Net Sink (penyerapan karbon bersih) bukan berarti Zero deforestasi (penghentian penggundulan hutan), tapi harap dicatat itu juga bukan berarti mensubs-



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jika hutan hanya dianggap sebagai Carbon Sink maka yang terjadi adalah hutan digunduli (deforestasi) lalu ditukar dengan penanaman mangrove. Lalu semua flora dan fauna langka Indonesia beserta ekosistemnya musnah dan kita tidak tau bencana kemanusiaan apa yang akan terjadi. Sudah jelas banjir akan melanda daerah sekitarnya karena tak ada lagi pohon-pohon besar penyerap air"

titus hutan yang sudah ada dengan rehabilitasi hutan mangrove dengan dalih memiliki nilai karbon yang sama.

"Jelas itu tidak sepadan dan kami akan melawan paradigma menteri LHK yang

keliru ini," tegasnya. Karena beliau juga seorang muslim maka saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 27 diterangkan bahwa ciri-ciri orang fasiq adalah merusak bumi," pungkasnya.

# Aleg PKS Minta KKP Kaji Ulang Implementasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021

## KUTIPAN

Jakarta (10/11) — Belakangan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak akibat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebijakan kementerian yang baru saja berulang tahun yang ke 24 ini kembali mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet.

Legislator asal Dapil kota/kabupaten Sukabumi ini mengungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I KKP di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (8/11/2021).

Slamet menyoroti implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang masih jauh dari nilai-nilai keadilan

sosial.

Menurutnya, terbitnya Permen KP tersebut telah membunuh mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir Kabupaten Sukabumi yang memang sudah turun temurun mengandalkan keberadaan anakan lobster tersebut.

"Kalau keadaan itu dikenakan kepada diri kita kemungkinannya 1 atau 2 bulan kita masih akan bertahan akan tetapi kondisi ini menimpa masyarakat nelayan yang tipikalnya secara umum hanya mencari lobster hari ini untuk memenuhi kehidupan hari ini juga," tegas Slamet kepada Dirjen Budidaya KKP.

Pada pasal 2 Permen KP menyebutkan bahwa penangka-

pan Benih Bening Lobster (*pue-rulus*) hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Sehingga apabila ada nelayan yang melakukan penangkapan BBL bukan untuk tujuan tersebut maka termasuk kategori penangkapan ilegal, dampaknya di Kabupaten Sukabumi sendiri sudah banyak kasus hukum yang menimpa para nelayan.

"Kami khawatir kejadian beberapa tahun lalu kembali terulang dimana terjadi konflik antara masyarakat nelayan dan aparat penegak hukum akibat banyaknya penangkapan para nelayan BBL," imbuhnya.

Slamet yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) menyampaikan bahwa seharusnya KKP ketika akan mengeluarkan sebuah peraturan harusnya segera mengeluarkan kebijakan antisipatif misalnya memberikan mata pencaharian alternatif kepada nelayan BBL selama masa peralihan aturan tersebut.

Selain itu, nelayan juga memerlukan insentif sebagai pengganti mata pencaharian mereka. KKP juga harus segera memasukkan investor budidaya



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jika ketiga cara tersebut dijalankan oleh KKP maka akan sangat membantu berjalannya transisi pengelolaan lobster di Indonesia. Sebaliknya jika KKP masih bertahan dengan pola seperti yang terjadi hari ini, bukan tidak mungkin akan membuka kembali potensi konflik antara aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan"

lobster di sentra-sentra penangkapan BBL sebagai offtaker dari penangkapan nelayan.

Slamet pun meyakini jika ketiga cara tersebut dijalankan oleh KKP maka akan sangat membantu berjalannya transisi pengelolaan lobster di Indonesia.

"Sebaliknya jika KKP masih bertahan dengan pola seperti yang terjadi hari ini, bukan tidak mungkin akan membuka kembali potensi konflik antara aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan," tegas Slamet.

Soroti Pungutan PNBP dalam PP No. 85/2021

# Politisi PKS: **Stop Pungutan, Rugikan Nelayan Kecil!**

**KUTIPAN**

Jakarta (09/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti adanya pungutan hasil perikanan yang bakal memberatkan dan merugikan nelayan kecil,

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Johan, walaupun pemerintah menargetkan realisasi PNBP sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,67 Triliun pada tahun 2022, namun untuk memenuhi target tersebut.

Johan meminta harus ada klasifikasi khusus dan detail terkait siapa saja (objek PNBP) yang akan terkena kenaikan pungutan PNBP tersebut.

"Saya minta Nelayan kecil tidak boleh menjadi korban dari aturan kebijakan tersebut," tegasnya.

Politisi PKS ini melihat pada perhitungan pungutan PNBP dalam PP 85 tahun 2021

memiliki skema yang sedikit berbeda dengan PP 75 tahun 2015 khususnya terkait Harga Patokan Ikan yang selama ini masih menggunakan Permen-dag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI).

"Kenaikan tarif yang bervariasi pada berbagai jenis layanan ini sangat memberatkan nelayan kita mengingat jumlah tangkapan dan produktivitas dari nelayan kita yang terus setiap tahun," ujarnya.

Johan juga mempertanyakan berubahnya definisi nelayan kecil yang dulu ada batasan ukuran Gross Tonnase (GT). Menurutnya kategorisasi nelayan kecil berdasarkan GT perlu dilakukan agar memudahkan nelayan kecil mendapatkan hak perlindungan dari Negara.

"Pemerintah harus memastikan serta menjamin dampak yang bisa ditimbulkan

dari naiknya pungutan PNBP khususnya bagi nelayan kecil," tandas Johan.

Dalam PP tersebut mengatur pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan baru atau perpanjangan dan diberikan pelabuhan pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan pascaproduksi.

Berdasarkan hal ini, Johan meminta KKP untuk membatasi secara detail terkait syarat-syarat usaha perikanan yang hanya dikenai pungutan praproduksi.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini melihat dengan adanya pajak pungutan diawal akan semakin memberatkan para nelayan untuk mempersiapkan aktivitas penangkapan ikan bahkan akan berhenti melakukan penangkapan ikan.

"Jenis pungutan ini sangat merugikan nelayan karena harus membayar sebelum berlayar," ujar Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta pemerintah meninjau ulang perhitungan indeks tariff PNBP ini sebab adanya potensi beban yang berat bagi usaha perikanan nasional dan berdampak merugikan nelayan kecil, saat ini mestinya sumberdaya perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan perikanan"

# Penularan Covid-19 Level 1, Aleg PKS: **Stop** Aturan yang Mempersulit Perjalanan!

## KUTIPAN

Jakarta (02/11) — Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko rendah penularan Covid-19.

Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mendesak Pemerintah berhenti membuat aturan yang mempersulit perjalanan, khususnya untuk moda transportasi darat. "CDC AS sudah menyatakan resiko penularan covid di Indonesia masuk kategori level 1. Artinya risikonya rendah. Bahkan jauh lebih baik dari Jepang dan Rusia yang masih dilevel 3. Jadi, sebaiknya pemerintah mulai merelaksasi aturan perjalanan bukan malah mempersulit seperti Surat Edaran Kemenhub Nomor 90 Tahun 2021," kata Sigit Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sigit menilai SE Kemenhub No.90 Tahun 2021 akan mempersulit mobilitas warga karena persyaratan wajib PCR

atau antigen untuk moda transportasi darat, termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor. Selain itu, persyaratan tersebut juga akan membebani masyarakat pengguna transportasi darat umumnya dari kalangan menengah ke bawah.

"Makin kesini pemerintah makin aneh saja. Semua pengguna transportasi darat baik umum maupun pribadi wajib PCR atau antigen untuk perjalanan lebih dari 4 jam atau 250km. Bahkan untuk penyeberangan seperti Merak-Bakauheni yang tarifnya hanya Rp15 ribu juga mau diwajibkan antigen yang tarifnya lebih mahal. Kan buat makin susah rakyat saja, padahal resiko penyebaran Covid-19 sudah rendah," Kata Sigit.

Sigit mengatakan aturan

wajib tes PCR atau antigen ini secara ekonomi akan menambah cost perjalanan penumpang. Disisi lain, juga akan berdampak pada kinerja sektor transportasi darat yang selama hampir dua tahun terpuruk akibat covid-19.

"Sudah banyak operator bus yang rugi bahkan terpaksa tutup karena pandemi. Sekarang covid sudah melandai, jangan mempersulit orang untuk bepergian. Jika pemerintah masih saja membuat aturan yang membebani penumpang, otomatis akan berimbas pada operator. Bisa lebih banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, kerugian operator mencapai Rp15,9 triliun/bulan," Kata Sigit.

Berdasarkan data Kemenhub, untuk transportasi darat, kerugian operator bus, taxi dan truk di semester pertama 2020 mencapai Rp 15,9 triliun/bulan atau sekitar Rp530 miliar/hari. Jumlah itu terbagi dalam angkutan penumpang sebesar Rp 8,4 triliun dan angkutan logistik senilai Rp 7,4 triliun.

Untuk kemudahan penumpang transportasi darat, Sigit meminta Kemenhub



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

“Sudah banyak operator bus yang rugi bahkan terpaksa tutup karena pandemi. Sekarang covid sudah melandai, jangan mempersulit orang untuk bepergian. Jika pemerintah masih saja membuat aturan yang membebani penumpang, otomatis akan berimbas pada operator. Bisa lebih banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, kerugian operator mencapai Rp15,9 triliun/bulan”

menghapus semua aturan yang membebani penumpang khususnya tes PCR atau antigen. Syarat perjalanan cukup dengan kartu vaksin. Sebagai skrining, kata Sigit, pemerintah bisa melakukan pemeriksaan random pada

penumpang dan diberikan secara gratis.

"Yang terpenting adalah taat prokes. Dan tingkatkan vaksinasi covid. Percuma kalau sudah vaksin penuh tapi aturannya masih ribet dan mahal," kata Sigit.

Terkait Aturan Perjalanan Darat

# Politisi PKS: **Jangan** Bebani Masyarakat

**KUTIPAN**

Aturan kontroversi Kemenhub tersebut akhirnya dicabut karena pemerintah tidak memiliki fakta data yang cukup untuk menjelaskan perjalanan jarak jauh dan jarak dekat. Aturan ini juga dinilai mampu memicu perdebatan antara masyarakat dan petugas pemeriksa lantaran banyak masyarakat yang berdomisili tidak sesuai dengan KTP atau STNK.

Jakarta (04/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengimbau pemerintah untuk berlakukan aturan perjalanan darat dengan dasar argumen yang kuat yakni sesuai dengan fakta dan data serta rasional.

"Keputusan pemerintah menghapus aturan perjalanan jarak jauh minimal 250 km (atau minimal waktu tempuh 4 jam) ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar argumen yang kuat. Di masa pandemi ini pemerintah seharusnya tidak membebani masyarakat dengan aturan yang membuat bingung." Protes Anggota Komisi

IV DPR RI ini.

Aturan kontroversi Kemenhub tersebut akhirnya dicabut karena pemerintah tidak memiliki fakta data yang cukup untuk menjelaskan perjalanan jarak jauh dan jarak dekat. Aturan ini juga dinilai mampu memicu perdebatan antara masyarakat dan petugas pemeriksa lantaran banyak masyarakat yang berdomisili tidak sesuai dengan KTP atau STNK.

"Masyarakat kita ini sedang berusaha bangkit di masa pandemi, jangan terus pemerintah banyak menuntut mereka. Justru sebaliknya, seharusnya pemerintah

memfasilitasi layanan tes secara massif dan gratis bagi masyarakat." Ujar Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini memberi masukan.

Saat ini, aturan perjalanan darat di masa pandemi merujuk pada SE Kemenhub No 94 Tahun 2021. Dimana perjalanan dari dan ke daerah Pulau Jawa dan Bali dengan kategori PPKM level 1, 2 dan 3 wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen dengan sampel maksimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Sedangkan, untuk daerah aglomerasi tidak perlu menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen dan kartu vaksin. PKS sendiri mendesak agar pemerintah secara proaktif melakukan sosialisasi pemberlakuan aturan kepada masyarakat.

"Langkah 3T (Testing, Tracing dan Treatment) harus terus diperkuat. Dorong masyarakat menegakkan protokol kesehatan secara ketat tapi tetap memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi masyarakat." Pungkas Suryadi.



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**  
Anggota Komisi V DPR RI

“Masyarakat kita ini sedang berusaha bangkit di masa pandemi, jangan terus pemerintah banyak menuntut mereka. Justru sebaliknya, seharusnya pemerintah memfasilitasi layanan tes secara massif dan gratis bagi masyarakat”

# Pencurian Aset pada Proyek KCJB, Aleg PKS Minta Pemerintah **Tunda** Suntikan Modal

**KUTIPAN**

Tasikmalaya (11/11) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali pemberian tambahan modal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek ini dianggap semakin tidak menguntungkan.

"Sebaiknya Pemerintah berpikir kembali untuk menyuntikan modal ke Proyek Kereta Cepat. Berjalannya waktu proyek ini terus membebani keuangan negara. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. Ditambah lagi insiden pencurian 111 ton besi proyek," ujar Politisi PKS.

Sebagaimana Kapolres Jakarta Timur, Toriq menyebutkan bahwa komplotan pencuri sudah berhasil menjual 111.081 kilogram besi dengan kerugian mencapai Rp1 miliar lebih. Dan menurutnya, baru satu titik pencurian yang terkuak. Boleh jadi ada titik-titik

lainnya. Karena itu ia berharap agar aparat Kepolisian menyelidiki kasus ini lebih dalam.

"Saya minta aparat Kepolisian terus mendalami insiden kasus pencurian ini. Usut tuntas, jangan berhenti hanya di satu titik. Selidiki juga titik-titik lain penyimpanan material dan peralatan bantu proyek ini," ujarnya.

Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung juga dinilai sangat tidak ekonomis. Bahkan rutenya sudah dipangkas tidak sampai Bandung, dan hanya sampai Padalarang saja. Selanjutnya

naik feeder naik kereta lagi ke Bandung ucap Toriq menambahkan.

"Sekali lagi saya ingatkan Pemerintah, anggaran sebanyak Rp 4,3 triliun yang akan digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebaiknya ditunda pengucurannya," pungkas Dia.

Terkait insiden pencurian pada Proyek KCJB, polisi menangkap lima anggota komplotan maling yang mencuri besi proyek tersebut. Lima tersangka pelaku itu antara lain SA, SU, AR, LR, dan DR.

Para pelaku mengaku telah beraksi sejak Juli hingga Oktober 2021. Mereka selalu beraksi di tengah malam hingga subuh. Polisi kini menggali dugaan keterlibatan orang dalam pada aksi komplotan tersebut.

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

"Sebaiknya Pemerintah berpikir kembali untuk menyuntikan modal ke Proyek Kereta Cepat. Berjalannya waktu proyek ini terus membebani keuangan negara. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. Ditambah lagi insiden pencurian 111 ton besi proyek,"



111 ton Besi Proyek KCIC dicuri

# Proyek Strategis Nasional Kok Mudah Dibobol



Tidak masuk akal karena proyek kereta cepat sudah di Perpreskan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Tapi seolah bukan proyek strategis nasional mudah dibobol begitu saja, apa status itu karena tujuannya hanya untuk mendapatkan kucuran modal negara dari APBN saja?

**H. HIDAYATULLAH, S.E**

Anggota Komisi XI DPR RI  
dari Fraksi PKS



# Sepakat dengan MUI, Legislator PKS Desak Pemerintah **Batalkan** Permendag Impor Minol

## KUTIPAN

Jakarta (08/11) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Menteri Perdagangan membatalkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 20 tahun 2021 yang mengatur kebijakan impor minuman alkohol.

Amin Sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa kebijakan untuk menaikkan jumlah impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melonggarkan aturan minuman alkohol impor.

Beleid itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Peraturan tersebut mengubah Permendag Nomor 20 tahun 2014 terkait impor MMEA dari batas maksimal 1000ml menjadi 2250ml.

“Meskipun kebijakan tersebut ditujukan bagi wisatawan asing, namun aturan itu berlaku umum. Dengan

pengawasan oleh pemerintah yang sangat lemah, sangat potensial minuman yang mengandung etil alkohol beredar secara ilegal di masyarakat umum,” tegas Amin.

Amin pun merujuk sejumlah penelitian yang dilakukan beberapa perguruan tinggi. Hasil penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak menyebutkan, peredaran minuman beralkohol ilegal marak terjadi Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin.

Demikian juga hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

yang menyebut tidak berjalan efektifnya pengawasan dan pengendalian peredaran Minol di Kota Gorontalo. Kajian yang sama juga ditunjukkan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) terkait pengawasan peredaran Minol di Kota Kudus, Jawa Tengah.

Hasil kajian di dua kota tersebut menunjukkan, kebiasaan mengkonsumsi Minol berdampak negatif dalam konteks sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat.

Kajian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga mengungkapkan, konsumsi Minol berdampak buruk bagi kesehatan hati, otak, jantung, dan bisa memicu kerusakan organ tubuh lainnya.

Minol berdampak gangguan jiwa dan juga kerusakan otak dan demensia secara dini akibat penyalahgunaan alkohol. Banyak kasus pikun terjadi pada usia muda akibat ada degenerasi saraf otak yang disebabkan alkohol.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu juga mengutip hasil Kajian Guru Besar Mahidol University Thailand, Montarat

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

“Meskipun kebijakan tersebut ditujukan bagi wisatawan asing, namun aturan itu berlaku umum. Dengan pengawasan oleh pemerintah yang sangat lemah, sangat potensial minuman yang mengandung etil alkohol beredar secara ilegal di masyarakat umum”

Thavorncharoensap pada 2009 yang mengungkapkan potensi kerugian ekonomi akibat minuman beralkohol (minol) mencapai Rp256 triliun per tahun.

“Dengan sejumlah fakta

yang merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat tersebut, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan semacam itu,” tanya Amin.

# Legislator PKS Usul Bentuk Tim Khusus Audit Kinerja Garuda

## KUTIPAN

Jakarta (12/11) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendorong agar dibentuk tim khusus guna mengaudit secara komprehensif dan independen terkait permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia.

Menurut Nevi, permasalahan yang membelit tubuh Garuda tampak seperti gunung es, karena masih ada potensi kasus kasus lainnya yang belum terungkap.

Saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Selasa, (9/11/2021), Nevi berpandangan bahwasanya penyewaan Boeing 737 Max yang gagal dan memiliki banyak masalah pada 2014 lalu turut berkontribusi atas kondisi Garuda saat ini.

“Keuangan PT Maskapai Garuda Indonesia mengalami kesulitan dengan utang

menembus Rp103 triliun. Selain pandemi, penyebab kebangkrutan Garuda Indonesia adalah kontrak sewa pesawat yang gagal dalam bisnis Garuda Indonesia,” ujar Nevi.

Politisi Fraksi PKS ini memaparkan, nilai sewa untuk 50 pesawat pada september 2014 tersebut terbilang mahal, yaitu mencapai lebih dari Rp42 triliun.

Di sisi lain, Nevi juga mengkritisi manajemen terdahulu yang dianggap turut berperan menciptakan kondisi Garuda Indonesia seperti saat ini.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Dengan kehadiran tim khusus tersebut yang mengaudit internal Garuda, Nevi berharap mendapat kejelasan informasi secara lengkap dan akuntabel terkait permasalahan yang membelit tubuh maskapai pelat merah ini. Mengingat BUMN yang seharusnya memberikan keuntungan kepada negara, tetapi jadinya malah merugikan negara,”

# Legislator PKS Soroti Paceklik Burung Besi Kebanggaan Negara

## KUTIPAN

Jakarta (04/11) --- Anggota Legislative Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menyatakan bingung atas kondisi maskapai Garuda Indonesia yang kini dilanda kepailitan.

Padahal, kata Mahfudz, transfusi dana dari Pemerintah atas persetujuan DPR RI pun ternyata belum sanggup memulihkan keadaan yang stabil bagi BUMN Transportasi Udara kita. Ia menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada (03/11/2021).

"Saya tidak berharap Garuda dipailitkan, saya masih optimis Garuda akan tetap mengudara di Nusantara kita," tegas Anggota Fraksi PKS Dapi Jawa Barat VI.

Namun demikian, Anggota dari Komisi VI yang membidang mengenai BUMN sendiri dibuat kalang-kabut untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini. Pasalnya, segala daya dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan burung besi kehormatan negara dengan

memberikan PAN alias Penyerataan Modal Negara kepada Garuda Indonesia malah memperlihatkan hasil yang nihil sama sekali. Hingga opsi mempailitkannya merupakan opsi paling terakhir dan yang paling potensial sebab pilihan semakin terbatas.

"Saya tidak mau menyaksikan Garuda akan mengalami nasib seperti Merpati, ini tentu sangat menyedihkan bagi kita semua," ucap liris Mahfudz.

Apalagi esensi dari masa kritis yang dialami PT. Garuda Indonesia juga sudah terkuak dari Peter F Gontha yaitu Mantan komisaris Garuda atas pernyataannya yang membocorkan bobroknya pengelolaan maskapai kebanggaan kita di semua lini dan beban utang yang ditanggungnya.

Sehingga, kata Mahfudz, akan sangat naif apabila kita terlalu percaya atas manajemen perusahaan yang katanya sudah menjadi perusahaan terbuka ternyata menyimpan malpraktik iuran misterius dari awak Garuda kepada Manajemen Garuda yang sudah dijalankan hingga puluhan tahun.

"Saya meminta Kementerian BUMN untuk meminta bantuan BPK dan BPKP mengaudit semua hal terkait Garuda, harus segera agar kita tahu seperti apa kinerja dan perilaku Manajemen Garuda selama ini. Kita tidak bisa lagi anggap Garuda sakit karena dampak Pandemi Covid-19. Justru kita harus menganggap Pandemi telah membuka bobroknya BUMN Penerbangan kita, yang selama ini tertutup atau bisa jadi sengaja ditutupi," ucap Mahfudz dalam pernyataan penutupannya dengan tegas.



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya meminta Kementerian BUMN untuk meminta bantuan BPK dan BPKP mengaudit semua hal terkait Garuda, harus segera agar kita tahu seperti apa kinerja dan perilaku Manajemen Garuda selama ini. Kita tidak bisa lagi anggap Garuda sakit karena dampak Pandemi Covid-19. Justru kita harus menganggap Pandemi telah membuka bobroknya BUMN Penerbangan kita, yang selama ini tertutup atau bisa jadi sengaja ditutupi,"

# Aleg PKS Desak Pemerintah Reklamasi Area Tambang, **Jangan Hanya** Kejar Keuntungan!

## KUTIPAN

Jakarta (10/11) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari meminta Pemerintah serius dalam melakukan reklamasi area tambang dan tidak hanya fokus mengejar keuntungan semata.

“Pertambangan ini selalu terkait dengan isu lingkungan, dimana disitu ada titik-titik pertambangan maka di situ akan terjadi juga persoalan lingkungan” disampaikan Diah saat rapat dengan Dirjen Minerba pada hari Rabu di Jakarta (10/11).

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan, yang sangat krusial dengan meningkatnya pertambangan nikel di Indonesia, khususnya dengan kebutuhan yang semakin tinggi pasti dampak lingkungannya akan semakin besar.

Oleh sebab itu, imbuhnya,

menjadi sesuatu yang penting dan serius harus di mitigasi Pemerintah sejak awal bagaimana cara melakukan reklamasinya.

“Saya yakin persoalan pertambangan ini tidak sederhana, jadi jangan sampai kita hanya fokus pada sekedar menarik keuntungan atau pemanfaatan dari pertambangan tersebut, tetapi proses reklamasi berikutnya tidak diselesaikan dengan tuntas. Saya perhatikan Indonesia cukup banyak yang masih terbengkalai,” pungkas Diah.



## Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol

Anggota Komisi VII DPR RI

“Saya yakin persoalan pertambangan ini tidak sederhana, jadi jangan sampai kita hanya fokus pada sekedar menarik keuntungan atau pemanfaatan dari pertambangan tersebut, tetapi proses reklamasi berikutnya tidak diselesaikan dengan tuntas. Saya perhatikan Indonesia cukup banyak yang masih terbengkalai”

# Terkait Kelangkaan BBM di Papua, Aleg PKS: Klaim Pemerintah BBM Satu Harga Cuma Lip Service

## KUTIPAN

Mulyanto minta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia penimbun BBM atau memang karena kemampuan distribusi Pertamina yang lemah.

Jakarta (08/11) — Kelangkaan pasokan BBM di Papua yang menyebabkan naiknya harga jual hingga Rp 50 ribu/liter mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Menurut Mulyanto, apa yang terjadi di Papua saat ini menunjukkan klaim Pemerintah soal BBM satu harga hanya lip service atau pemanis bibir. Nyatanya harga jual BBM di Papua sangat tinggi, beda jauh dengan di pulau lain.

"Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Pemerintah harus segera perintahkan

Pertamina dan BPH Migas stabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali. Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus serius menyelesaikan masalah ini dan segera menjelaskan kepada publik kenapa hal ini terjadi.

Mulyanto minta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia penimbun BBM atau memang karena kemampuan

distribusi Pertamina yang lemah.

"Soal kelangkaan yang memicu harga menjadi tidak normal ini sudah sering terjadi. Bahkan keluhan masyarakat baik di Jawa maupun luar Jawa atas hilangnya Pertalite dari pasaran juga belum terselesaikan," ungkapnya.

Pertamina, imbuh Mulyanto, jangan sekedar mewacanakan kenaikan harga BBM, namun tidak menyelesaikan soal kelangkaan tersebut.

"Ini kan terkesan, Pemerintah hanya sekedar mengambil solusi mudah yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat dengan harga BBM mahal," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan bahwa sudah hampir sepekan harga BBM di Papua melejit hingga Rp 50 ribu/liter. Selain harga yang tinggi pasokan BBM ke Papua juga diduga berkurang. Akibatnya di beberapa SPBU terjadi antrian panjang.



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Pemerintah harus segera perintahkan Pertamina dan BPH Migas stabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali. Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua. "



BBM Langka di Papua,  
Klaim Satu Harga

# Cuma Lip Service



Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Pemerintah harus segera perintahkan Pertamina dan BPH Migas stabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali. Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI  
dari Fraksi PKS

Demi Tujuan Pendidikan

# HNW: Menag **Harusnya** Nasehati Mendikbud yang Permen-nya Banyak Ditolak, Bukan Dukung

KUTIPAN

Jakarta (11/11) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi Menteri Agama Yaquut Cholil Koumas yang mestinya menasehati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim,

Terkait Peraturan Mendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang ditolak oleh banyak pihak, termasuk oleh Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena substansinya bisa menggagalkan tujuan pendidikan Nasional.

Sebab, imbuh HNW, Permendikbud tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, norma Agama, dan kepatutan sosial.

"Seharusnya Menag menasehati Mendikbudristek yang kembali membuat kebijakan yang mengabaikan Agama. Karena sebelumnya

Kemendikbud juga membuat Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang ditolak publik karena tak sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI 1945 karena sama sekali tidak menyebut frasa Agama. Akhirnya Peta Jalan tersebut ditarik oleh Kemendikbud. Masalah kontroversial itu kini malah diulangi dengan dikeluarkannya Permendikbudristek no 30/2021, yang seperti Peta Jalan Pendidikan Nasional, juga tak sesuai dengan Pancasila, UUDNRI 1945 dan Agama. Dan seperti Peta Jalan Pendidikan Nasional, Permendikbudristek yang terakhir ini juga mendapatkan penolakan dari masyarakat

luas. Karenanya, mestinya Menag menasehati Mendikbudristek agar mengkoreksi Permen-nya dengan menarik atau merevisi dan tidak mengulang membuat Permen yang kontroversial. Agar semua bersatu padu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, agar tujuan Pendidikan Nasional dapat diwujudkan. Tapi disayangkan, Menag malah mendukung Permendikbudristek yang bermasalah itu," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Sebagaimana diberitakan sejumlah media yang merujuk pada laman resmi Kemenag.go.id. Menag Yaquut mendukung Menteri Nadiem dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan malah akan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag bagi perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia.

"Sikap Menag tersebut tentu wajar dikritisi. Sekalipun Kita sepakat prihatin dengan terjadinya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan lainnya, dan kita tentu juga sepakat



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Sangat baik dan semestinya bila Menag menasehati Mendikbud terkait permendikbudristek yg kontroversial itu. Apalagi kritikan-kritikan dan penolakan-penolakan itu terkait dengan konten yang terhubung dengan diabaikannya ajaran Agama."

untuk mencegah, menolaknya dan mencari jalan untuk mengatasinya. Tetapi Permendikbud itu bermuatan ketentuan-ketentuan yang tidak efektif untuk mencegah dan mengatasinya, karena hanya menyoal satu sisi 'kekerasan seksual', dan mengabaikan fakta adanya 'kejahatan seksual

yang terjadi dengan tanpa kekerasan atau dengan kesepakatan', suatu kejahatan seksual yang juga banyak terjadi di Perguruan Tinggi, dengan korbananya dari kalangan Perempuan juga  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Polemik Permen Kekerasan Seksual

## Aleg PKS : Moralitas Bangsa Dipertaruhkan

### KUTIPAN

Jakarta (11/11) — Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iskan Qolba Lubis menyangkan adanya Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

"Permendikbud ini jelas bermasalah dan telah meresahkan umat. Puluhan Ormas Islam dan bahkan Muhammadiyah pun telah menolak Peraturan PPKS ini," ungkap Iskan.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada 31 Agustus 2021.

Menurutnya, Permendikbudristek no 30 tahun 2021 banyak mengadopsi Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS) yang gagal lolos di Komisi VIII DPR RI peri-

ode lalu dan pihaknya memiliki alasan dan argumen yang kuat untuk menolak RUU tersebut.

"Bisa dilihat sepintas, Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang ditolak masyarakat Indonesia secara masif di periode yang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah satu poin pentingnya terletak pada istilah paradigma seks bebas yang berbasis persetujuan (Sexual-Consent)," tegas Iskan.

Tentu saja ini sangat berbahaya, lanjutnya, karena dalam aktivitas seksualnya, ukuran benar salahnya bukan berdasarkan nilai Agama dan moralitas yang dikedepankan, melainkan persetujuan dari

para pihak.

Legislator asal Sumatera Utara II ini juga memaparkan bahwa mereka berlindung dibalik kata-kata tidak ada pemaksaan, dan persetujuan para pihak, serta rasa saling suka sama suka, maka aktivitas seksual itu menjadi halal.

"Bukankah sama saja ini kita membuka pintu seks bebas untuk dilegalkan? Permendikbud ini sangat berpotensi melegalkan dan memfasilitasi perbuatan zina dan perbuatan menyimpang LGBT yang tentunya saat ini moralitas bangsa kita sedang dipertaruhkan karena telah jelas hal ini bertentangan dengan Nilai Agama dan Pancasila serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Iskan.

Iskan pun meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya mencabut Permendikbud no 30 Tahun 2021. Atau setidaknya merevisi dan merumuskan kebijakan dan peraturan berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945.

"Semoga Bapak Menteri bisa mendengar suara masyarakat Indonesia dan segera mencabut



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dakil Sumatera Utara II

"Semoga Bapak Menteri bisa mendengar suara masyarakat Indonesia dan segera mencabut Permendikbud ini. Hentikan Polemik ini, mari bersama-sama kita cegah dan hapus kekerasan seksual dengan aturan yang diatur berdasarkan nilai agama, nilai Pancasila dan norma masyarakat Indonesia"

Permendikbud ini. Hentikan Polemik ini, mari bersama-sama kita cegah dan hapus kekerasan seksual dengan

aturan yang diatur berdasarkan nilai agama, nilai Pancasila dan norma masyarakat Indonesia," pungkas Iskan mengakhiri.

Kotak Amal dan LAZ Sasaran Operasi

# Aleg PKS: Jangan Jadikan Densus 88 Lembaga Islamophobia!

**KUTIPAN**

Jakarta (07/11) — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita ratusan kotak amal selama menjalankan operasi penangkapan terhadap sejumlah terduga pelaku kasus terorisme di Lampung dalam beberapa hari belakangan.

Dalam operasi itu terdapat tiga terduga pelaku yang diamankan. Mereka antara lain beberapa petinggi di yayasan amal bernama Lembaga Amil Zakat Baitul Maa' Abdulrahman Bin Auf (LAZ BM ABA).

Dalam keterangan Humas Polda Lampung disebutkan, sebanyak 791 kotak amal telah disita sebagai barang bukti yang diklaim digunakan untuk mendanai agenda terorisme.

Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara.

Bukhori mengkritik narasi yang dibangun Densus 88 Polri lantaran khawati hal itu menimbulkan kesan Islamophobia di tengah masyarakat.

"Kami mendukung upaya negara dalam memberantas terorisme. Namun kami menolak cara-cara yang tendensius sehingga membuat umat Islam tersudut dan dirugikan akibat narasi berbau Islamophobia. Narasi itu sudah usang di Barat, sayangnya kita masih saja mengimpornya," kritiknya.

Politisi PKS ini mengatakan, penangkapan ketua Lembaga Amil Zakat di Lampung yang dituding terlibat aktivitas terorisme oleh Densus 88 Polri kian memperkuat persepsi publik soal adanya indikasi agenda Islamophobia yang didorong oleh pihak tertentu.

"Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga resmi di bawah naungan BAZNAS. LAZ ini tidak

boleh beroperasi sebelum ada izin dari Kementerian Agama," imbuhnya.

Lebih lanjut, anggota DPR yang pernah bermitra dengan Polri ini mengungkapkan, operasi Densus 88 Polri yang menarasikan kotak amal dan lembaga zakat sebagai medium pendanaan aktivitas terorisme akan berimbas negatif pada niat ibadah zakat atau sedekah umat Islam.

"Polri perlu membeberkan secara transparan, apakah dari ratusan kotak amal maupun dana yang terhimpun di lembaga zakat terkait benar-benar digunakan sepenuhnya untuk aktivitas yang mereka klaim sebagai aktivitas terorisme? Sebab kami belum sepenuhnya yakin semua dana yang dihimpun itu digunakan untuk kegiatan terlarang," sambungnya.

Narasi yang dibangun oleh Densus 88 Polri, demikian legislator dapil Jawa Tengah 1 ini menambahkan, jangan sampai menyesatkan publik sehingga membuat mereka enggan untuk beramal di kotak amal atau melalui lembaga



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Polri perlu membeberkan secara transparan, apakah dari ratusan kotak amal maupun dana yang terhimpun di lembaga zakat terkait benar-benar digunakan sepenuhnya untuk aktivitas yang mereka klaim sebagai aktivitas terorisme? Sebab kami belum sepenuhnya yakin semua dana yang dihimpun itu digunakan untuk kegiatan terlarang"

zakat. Selain membuat umat ragu untuk ibadah, kampanye negatif ini juga akan berdampak serius pada upaya BAZNAS dalam menghimpun potensi zakat nasional, ujarnya.

"Jika kebetulan hanya didapati satu atau dua pos keuangan dari lembaga zakat terkait yang terbukti digunakan

untuk kegiatan terlarang, maka jangan dikatakan kotak amal dan lembaga zakat sebagai penyokong kegiatan terorisme. Implikasinya, kampanye negatif terhadap lembaga zakat juga akan merugikan lembaga negara lain, yakni BAZNAS selaku lembaga amil zakat nasional," pungkasnya.

## Waspada! Varian Delta Plus

# Anggota FPKS: **Perketat** Perbatasan dan Pelacakan

### KUTIPAN

Jakarta (11/11) — Virus Covid-19 varian AY.4.2 atau Delta Plus telah masuk ke Malaysia setelah menjadi satu penyebab naiknya kembali kasus Covid-19 di Inggris dan sejumlah negara.

Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar pengetatan dan pelacakan dari negara-negara sudah ada varian Delta Plus dilakukan oleh pemerintah RI.

"Pemerintah mengonfirmasi varian Delta Plus lebih berbahaya sehingga perlu dilakukan pengetatan secara temporer dari negara-negara yang tinggi tingkat penyebaran varian Delta Plus," papar Mufida dalam keterangannya, Kamis (11/11/2021).

Apalagi saat ini kebijakan terbaru karantina kedatangan dari luar negeri cukup 3x24 jam bagi mereka yang sudah vaksin lengkap. Bagi Mufida, pengurangan waktu karantina dari luar negeri bisa menjadi titik lemah masuknya varian-

varian baru ke Indonesia.

"Terdeteksinya kasus Delta Plus di Malaysia dibawa dari pelajar yang sekolah di Inggris. Terdeteksi negatif saat tes PCR pertama tapi terkonfirmasi terkena varian Delta Plus saat menjalani karantina. Nah jika karantina kita diperpendek ada kemungkinan lebih besar masuknya varian Delta Plus ini lebih mudah," sebut Mufida.

Ia melihat ada dua titik kritis yang patut diwaspadai pemerintah jelang akhir tahun ini. Titik kritis pertama adalah varian baru dari luar negeri yang jadi ancaman dari luar. Sementara titik kritis kedua adalahantisipasi gelombang ketiga usai pelonggaran di dalam negeri.

"Ada kenaikan tren kasus

di di 155 kota/kabupaten dalam seminggu terakhir dan di tiga kota dalam tiga minggu terakhir. Nampaknya memang harus diwaspadai betul datangnya gelombang ketiga. Karena pada saat yang sama, pelanggaran sudah terjadi dimana-mana dan banyak sektor," ujar Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Mufida meminta pemerintah baik pusat maupun jika terjadi keaikan kasus yang menarik rem darurat pelanggaran yang sudah dibuat jika terjadi keaikan kasus yang cepat akibat pelanggaran dan varian Delta Plus.

"Publik harus diberi peringatan dan sosialisasi tentang potensi gelombang ketiga ini. Siapkan mitigasi belajar dari gelombang kedua. Tetap siagakan tempat isoman, jamin ketersediaan obat, oksigen dan tetap siagakan Satgas hingga level RT/RW," ujar dia.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Terdeteksinya kasus Delta Plus di Malaysia dibawa dari pelajar yang sekolah di Inggris. Terdeteksi negatif saat tes PCR pertama tapi terkonfirmasi terkena varian Delta Plus saat menjalani karantina. Nah jika karantina kita diperpendek ada kemungkinan lebih besar masuknya varian Delta Plus ini lebih mudah"

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Aleg PKS: Permendikbud yang Mengatur Persetujuan Seksual Tak Sesuai Norma Hukum di Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (08/11) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai, ketentuan tentang persetujuan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 3/ 2021, tidak dikenal di dalam norma hukum di Indonesia.

“Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan,” kata dia di Jakarta, Senin (08/11).

Polemik tentang persetujuan seksual muncul setelah Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada September lalu.

Dalam Permendikbudristek tersebut tercantum frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf b, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m.

Menurut Fikri, dalam frasa ‘tanpa persetujuan korban’ terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent.

“Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka,” imbuhnya.

Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana.

“Pasal 284 KUHP misalnya, mengancam hukuman penjara bagi yang melakukannya,” tambah Fikri.

Bahkan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (HAM) masih menambahkan peran aturan agama dalam hak-hak Wanita. Pasal 50 dalam UU HAM berbunyi: ‘Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya’. Padahal UU 39/1999 adalah salah satu konsideran yang tercantum dalam pembentukan Permendikbudristek 30/2021.

Selain itu UU Sisdiknas yang juga dicantumkan sebagai konsideran pada dasarnya memiliki semangat yang berlandaskan moral-moral Pancasila.

Pasal 3 UU 20/2003 tentang Sisdiknas menjelaskan, bahwa fungsi Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi moral agama, nilai pancasila dan berketuhanan yang maha esa, sudah seharusnya kita menolak budaya seks bebas”

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fikri menegaskan, fraksinya sangat menentang segala bentuk kekerasan seksual yang tertulis sebagaimana di dalam judul Permendikbud 30/2021. Namun di sisi lain, juga tidak setuju dengan legalisasi

perzinahan.

“Sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi moral agama, nilai pancasila dan berketuhanan yang maha esa, sudah seharusnya kita menolak budaya seks bebas,” pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: Permen Tentang Kekerasan Seksual **Abaikan** Nilai Pancasila!

## KUTIPAN

Jakarta (03/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes menyoroti sikap Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang 'Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi'.

Permen ini, lanjut Fahmy, hadir 'menyelinap' diam-diam dan menyalip begitu saja di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

"Tentu saja maksud dari Peraturan ini baik, untuk mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permen ini mendefinisikan 'kekerasan seksual,'" ungkap Fahmy.

Adapun redaksi dari Permenbudristek tersebut, lanjut Fahmy yakni, 'setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyering tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/

atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan repro-duksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.'

Dengan definisi seperti itu, imbuh Fahmy, Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (asusila) yang sangat mungkin dan bahkan kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktik perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT).

"Peraturan ini hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan transaksi atau

kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban (lihat Pasal 5 ayat 2 j : "membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.") Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan, bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu semua tindakan yang dianggap normal, meski agama dan Pancasila menilainya sebagai perbuatan yang a-moral ! Bagaimana mungkin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat suatu Peraturan yang mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan sekaligus menabrak nilai-nilai luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab," urai Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat V ini.

Tentu saja, kata Fahmy, Peraturan ini menjadi sangat bermasalah dan menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran dan kemarahan banyak pihak.

"Sejumlah ormas Islam



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**  
Anggota Komisi X DPR RI

**"Permendikbud Ristek No 30/2021 ini harus segera direvisi dan dilengkapi. Dengan harapan, Peraturan ini kemudian dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila"**

yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) yang terdiri dari; Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Mathla'ul Anwar, Al Ittihadiyah, Al Washliyah, Persatuan Islam (PERSIS), Wahdah Islamiyah, Al Irsyad Al

Islamiyah, Hidayatullah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) telah memprotes Peraturan tersebut," jelasnya.  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kritisi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

# Aleg PKS: Dasar Hukum Tak Jelas, Isinya Jauh dari Nilai Pancasila

**KUTIPAN**

Jakarta (02/11) — Terbitnya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikritisi anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Pertama, Ledia mempertanyakan dasar hukum keluarnya Peraturan Mendikbudristek ini.

"Secara mendasar kita perlu ingat bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek harus mengacu pada Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Maka terbitnya Peraturan Menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan

hukumnya saja belum ada."

Kedua, Ledia menyayangkan bahwa beberapa muatan dalam isi Peraturan Menteri ini jauh dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme.

"Sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang termuat di pasal 3. Padahal Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (BPIP) merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan," terang Ledia.

Selain ketiadaan landasan norma agama, muatan-muatan Peraturan Menteri ini menurut Ledia banyak memasukkan unsur liberal dalam mengambil sikap.

"Definisi kekerasan seksualnya menjadi bias, misalnya saja ketika memasukkan salah satu jenis kekerasan seksual pada 'penyampaian ujaran yang mendiskriminasi identitas gender'. Ditambah pula Peraturan Menteri ini memasukkan persoalan 'persetujuan' atau yang biasa dikenal sebagai \_consent\_ menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada pasal 5 ayat 2. Bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Ditambah dengan tidak dimasukkannya norma agama, generasi muda kita seolah digiring pada satu



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Setelah dicermati, peraturan menteri ini hanya menambah beban birokratisasi administrasi baru dengan segala ketentuan perizinan dan belum menampakkan satu klausulpun yang bisa memastikan proses hukum berjalan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual"

konteks bahwa 'dengan persetujuan suatu perilaku terkait seksual bisa dibenarkan'. Jelas-jelas berbahaya ini." Kritik Anggota Baleg DPR RI ini pula.

Ledia kemudian memberi contoh betapa banyak terjadi hubungan seks di luar nikah

yang diawali dengan persetujuan atau suka sama suka. Juga betapa mulai bermunculannya perilaku LGBT secara terang-terangan di tengah masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Meningkat

# Aleg PKS Desak Kemendikbudristek dan Kepolisian Tindak Tegas

## KUTIPAN

Jakarta (07/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal mengancam kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah pada sejumlah daerah.

Mustafa pun mendesak Kemendikbud Ristek dan Kepolisian melakukan penegakan hukum kepada para pelaku dugaan kekerasan tersebut agar menjadi contoh yang menyebabkan efek jera bagi yang lainnya.

"Saya meminta Kemendikbud Ristek dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Kita harus menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan ketenangan, keamanan dan kenyamanan kepada para anak didiknya untuk belajar. Hukum harus ditegakkan," kya Mustafa Kamal pada Jum'at (05/11/2021).

Mustafa menambahkan, kekerasan di dunia pendidikan baru-baru ini meningkat sejak dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di antaranya adalah tawuran antar murid SMA di Kota Bogor yang menewaskan satu orang. Kemudian seorang murid SD di Musi Rawas Sumatera Selatan dikeroyok 4 murid lain yang mengakibatkan korban terancam lumpuh.

Ada lagi di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, seorang guru diduga melakukan kekerasan seksual. Lalu di Batam Kepulauan Riau (Kepri) akibat pelanggaran kedisiplinan, belasan siswa SMK Penerbangan diduga mengalami kekerasan, dikurung oleh pihak sekolah di dalam sel.

Kemudian yang terbaru, di Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) seorang guru menganiaya siswa karena tidak membuat tugas

hingga tewas setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit

"Kasus-kasus ini adalah bukti dunia pendidikan kita masih belum aman dari tindak kekerasan dan ini terus menerus terjadi. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini enggan pergi bersekolah karena takut akan kekerasan seksual, intoleransi dan perundangan di lingkungan sekolah," ujar Anggota Fraksi PKS ini.

Terakhir Mustafa mengingatkan Kepolisian untuk menindak tegas para pelaku sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Karena korban masih berusia anak, maka harus digunakan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Jika itu berkaitan dengan tanggung jawab institusi pendidikan maka Kemendikbud Ristek juga harus menindak tegas sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," tegas Legislator Dapil Sumatera Selatan I tersebut.



**H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Saya meminta Kemendikbud Ristek dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Kita harus menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan ketenangan, keamanan dan kenyamanan kepada para anak didiknya untuk belajar. Hukum harus ditegakkan,"

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

# Aleg PKS: Tidak Jelas dan Tidak Dibutuhkan

## KUTIPAN

Palu (07/11) — Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan peraturan No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai kritik keras.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mempertanyakan peraturan Mendikbud-Ristek yang diterbitkan baru-baru ini.

"Permendikbudristek ini tidak mengatur perbuatan zina dan perilaku menyimpang LGBT yang dilarang oleh agama sebagai satu bentuk kejahatan seksual", kata Sakinah melalui rilisnya, Ahad (07/11).

Kemendikbudristek memang memiliki niatan baik seperti yang dicantumkan dalam konsideran permendikbudristek itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Fatalnya Permendikbud

ri ini memuat frasa tanpa persetujuan Korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya, ini merusak generasi bangsa," ungkap Sakinah.

Anggota Dewan dari Dapil Sulawesi Tengah ini juga menambahkan bahwa dalam Permendikbudristek itu misalnya pelaku yang membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban termasuk Kekerasan Seksual.

"Nah sebaliknya jika dilakukan dengan persetujuan Korban, dilakukan dengan dilis suka sama suka berarti tidak merupakan Kekerasan Seksual. Perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban tetap

salah dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang luhur serta budaya luhur bangsa kita," tegasnya.

Disamping itu, menurutnya pembentukan Satuan Tugas akan menambah beban Perguruan Tinggi dan dikhawatirkan konsentrasi Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas akan terabaikan.

"Harus dibentuknya Satuan Tugas dan pelaksanaan pelatihan serta penyediaan akomodasi serta sarana prasarana pendukung seperti rumah aman justru menambah beban baru bagi kampus maupun sivitas Perguruan Tinggi", tegas Sakinah.

Menurut Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairat ini, setiap sivitas Perguruan Tinggi telah diberikan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan wewenang dan tupoksinya. Pembentukan satgas terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi semakin menambah daftar panjang tugas perguruan tinggi.

"Semakin menumpuk tugas yang dibebankan



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

"Semakin menumpuk tugas yang dibebankan perguruan tinggi dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi menjalankan tugas pokoknya yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kalau tidak fokus maka tidak akan tercapai tujuan utama perguruan tinggi tersebut",

perguruan tinggi dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi menjalankan tugas pokoknya yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kalau tidak fokus maka tidak akan tercapai tujuan utama perguruan tinggi tersebut", ungkap Sakinah

"Kita sepekat perbuatan

zina dan penyimpangan LGBT harus diberantas guna melahirkan generasi yang bermartabat, menjaga moral bangsa namun dengan peraturan dan muatan yang benar sesuai dengan kaidah perundang-undangan, agama dan norma bangsa yang luhur", pungkasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Anjlok

# Legislator PKS: Bentuk Kelalaian Pemerintah Atasi Gelombang Covid-19 Delta

## KUTIPAN

Jakarta (10/11) — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2021 mencapai 3,51 persen secara year on year (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pertumbuhan anjlok dari sebelumnya Kuartal II-2021 di angka 7,07 persen menjadi 3,51 persen karena masuknya varian delta yang tidak diantisipasi pemerintah. "Angka ini jauh dibawah prediksi pemerintah yang menyebut angka 4,5 persen, ekspektasi pemerintah ketinggian," katanya di Jakarta (08/11).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi ini juga menyebut bahwa dampak kegagalan Pemerintah untuk mengantisipasi Penyebaran Covid-19 Gelombang ke II atau varian delta pada periode Juli-September 2021, sehingga Pemerintah menetapkan PPKM Darurat yang menghambat dan menghentikan mobilitas masyarakat, terlihat dari negatif pertumbuhan transportasi dan

akomodasi.

Menurut Anis penurunan juga dapat terlihat jelas pada jebloknya konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2021 yang turun ke angka 1,03 dari sebelumnya 5,96 di kuartal II.

"Padahal konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar distribusi ekonomi Indonesia," katanya.

Menurut Legislator PKS ini kebijakan fiskal pemerintah di tengah pandemi tidak efektif, ini tergambar dengan rendahnya konsumsi pemerintah di kuartal III 2021 yakni hanya sebesar 0,66 persen saja.

"Harusnya konsumsi pemerintah bisa menolong tapi faktanya berbeda, konsumsi pemerintah pada kuartal II 2021 sebesar 8,03, tapi justru kuartal III nya turun drastis menjadi 0,66 disaat

perekonomian perlu didorong pemerintah," ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan pemerintah harus konsisten dalam menghadapi pandemi yang masih belum ada kepastian kapan berakhir.

"Karena untuk mengerjakan perekonomian agar bertumbuh ialah dengan menjaga tren penurunan kasus Covid-19 sehingga daya beli kembali pulih dan konsumsi rumah tangga kembali normal, selain itu pemerintah perlu mendorong dari sisi bantuan sosial dan PEN yang tepat sasaran agar memiliki multi-player efek yang baik," ujarnya.

Menurut Anis perekonomian nasional masih diselamatkan dengan tingginya harga komoditas, sehingga nilai ekspor pada Triwulan III-2021 cukup tinggi.

"Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2021 belum mencerminkan usaha dan kebijakan Pemerintah dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, tapi lebih banyak dipicu oleh kondisi eksternal," katanya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Kebijakan fiskal pemerintah di tengah pandemi tidak efektif, ini tergambar dengan rendahnya konsumsi pemerintah di kuartal III 2021 yakni hanya sebesar 0,66 persen saja. Harusnya konsumsi pemerintah bisa menolong tapi faktanya berbeda, konsumsi pemerintah pada kuartal II 2021 sebesar 8,03, tapi justru kuartal III nya turun drastis menjadi 0,66 disaat perekonomian perlu didorong pemerintah"



#Tetap  
**Jaga  
Prokes**

Indonesia  
Mulai Membaik

**Terima Kasih**  
**#Nakes** Pahlawan  
Bangsa

# Anggota Baleg FPKS Minta Draf RUU TPKS Dilengkapi Naskah Akademik

## KUTIPAN

Jakarta (03/11) — Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf meminta draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dilengkapi dengan Naskah Akademik agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan DPR

Pasalnya, imbuhan Bukhori, mayoritas anggota panitia kerja (panja) RUU TPKS belum menerima salinan Naskah Akademik draf RUU TPKS dari pihak pengusul.

"Ketentuan mengenai Naskah Akademik setidaknya telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib," ujarnya.

Naskah Akademik menu-rut Pasal 1 Ayat (11) UU No. 12/2011 dijelaskan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

"Kewajiban menyertakan naskah akademik dalam penyusunan RUU disebutkan di Pasal 43 Ayat (3) UU No. 12/2011 yang menyatakan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Namun penyertaan naskah akademik dikecualikan bagi RUU APBN, penetapan Perppu, dan pencabutan Perppu sebagaimana disebutkan di Pasal 43 Ayat (4)," sebut Bukhori.

Selanjutnya, Bukhori menambahkan, di Pasal 126 Peraturan DPR tentang Tata Tertib juga diterangkan, ang-

gota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam mempersiapkan RUU terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU.

"Pentingnya penyertaan naskah akademik, selain untuk membaca sinopsis dari RUU, adalah sebagai bentuk tertib hukum. Sehingga, pihak pengusul tidak bisa asal bunyi tanpa adanya basis argumen yang jelas. Karena itu kami meminta agar draf RUU ini segera dilengkapi dengan Naskah Akademik," ucapnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS di Badan Legislasi, Senin (01/11/2021)

Selain menyoroti soal Naskah Akademik, Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengkritik substansi dalam draf RUU TPKS terbaru. Dirinya menyoroti Konsideran draf RUU, khususnya konsideran filosofis pada huruf a, yang dianggap melompat langsung pada landasan UUD NRI 1945 sehingga berakibat pada diabaikannya landasan Pancasila yang tidak disebutkan dalam konsideran.

"Undang-Undang Dasar memiliki fundamen filsafat (Philosophische Grondslag)



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Draf RUU ini harus disusun dengan cermat dan komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban sosial kita kepada masyarakat. Jangan sampai ada celah di dalam rancangan ini sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan masif di masa depan lantaran tidak diantisipasi sejak sekarang,"

yang terletak di Pembukaannya, dimana jantungnya ada di alinea ketiga dan keempat. Sementara di alinea keempat itu terdapat Pancasila, dimana sila Pancasila itu terletak pada sila pertama. Namun demikian,

sangat disayangkan di dalam draf ini tidak disinggung sama sekali berkenaan dengan hal itu. Maka, konsideran ini perlu disempurnakan," kritiknya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Amin Ak **Usulkan** Pembentukan Pansus Tangani PT Garuda Indonesia

## KUTIPAN

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan mismanajemen yang mengakibatkan kerugian di PT Garuda Indonesia.

Menurutnya perusahaan maskapai ini mengalami kebangkrutan bukan semata-mata karena akibat krisis pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan tindakan moral hazard manajemen Garuda Indonesia selama bertahun-tahun yang membebani perusahaan pelat merah ini.

Dia mendesak agar dibentuk pansus yang mengungkap kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia ini. "Karena itu pimpinan, saya Amin AK melalui forum ini mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia, agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang," papar Amin saat Rapat Paripurna di Nusantara II,

Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Politisi Fraksi PKS ini juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh, dan semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa terkecuali. "Ini penting agar praktik-praktik moral hazard tidak terus terjadi di Badan Usaha Milik Negara," ujar Amin.

Di antara bentuk tindakan moral hazard yang diungkapkan Amin antara lain, adanya penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, sebanyak 142 unit yang sebetulnya kebutuhan realnya 41 unit. Penggelembungan harga sewa 1,4 juta dolar AS perbulan, dan harga wajar 750 ribu dolar AS

per bulan. "Dan juga pemborosan keuangan perusahaan untuk melayani gaya hidup mewah para direksi dan komisaris," ungkapnya.

Wakil rakyat dapil Jawa Timur IV ini beranggapan jika permasalahan di PT Garuda Indonesia tidak ditangani dengan solusi yang tepat maka negara terancam kehilangan warisan terpenting dari pendiri bangsa. "Garuda adalah bagian terpenting dari perjuangan bangsa Indonesia, dan merupakan ekspresi nasionalisme rakyat yang bahkan saat itu rela menyumbangkan harta bendanya agar negara ini mempunyai penerbangan sendiri," jelas Amin.

Dia mengatakan eksploitasi di tubuh Garuda Indonesia selama bertahun-tahun telah mengakibatkan maskapai penerbangan nasional yang mengusung misi kebesaran merah putih di pentas internasional berada di tepi jurang kepailitan. Masyarakat juga sudah dipertontonkan, salah satu simbol kebanggaan bangsa ini, telah dicerderai dan dikhiyanati oleh mereka yang mementingkan nafsu untuk memperkaya diri.

"Kita juga trancam kehilangan ribuan SDM handal yang selama ini bergelut di industri penerbangan, sebuah kondisi yang sangat menyakitkan bagi kita semua," pungkas Amin. (eko/es)



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Exploitasi di tubuh Garuda Indonesia selama bertahun-tahun telah mengakibatkan maskapai penerbangan nasional yang mengusung misi kebesaran merah putih di pentas internasional berada di tepi jurang kepailitan. Masyarakat juga sudah dipertontonkan, salah satu simbol kebanggaan bangsa ini, telah dicerderai dan dikhiyanati oleh mereka yang mementingkan nafsu untuk memperkaya diri. Kita juga trancam kehilangan ribuan SDM handal yang selama ini bergelut di industri penerbangan, sebuah kondisi yang sangat menyakitkan bagi kita semua

# Politisi PKS Tagih Janji Presiden Terkait Swasembada Pangan dan Kemaritiman

**KUTIPAN**

Jakarta (01/11) — Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menyampaikan argumennya terkait refleksi Hari Pangan Sedunia dan Hari Maritim Nasional dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2021-2022.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet menyampaikan refleksi Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Oktober dengan ucapan Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada pangan dalam kurun 3 tahun kedepan. Namun, data justru menunjukkan fakta yang sebaliknya. Data komoditas impor Indonesia di semester 1 tahun 2021 memperlihatkan bahwa total nilai impor pangan Indonesia mencapai 15 juta ton bahan pokok atau setara dengan Rp111,9 triliun.

“Sampai di tahun ketujuh ini janji Jokowi hanyalah janji belaka. Sejauh ini, pengeluaran

sumber pangan dalam negeri justru berasaldari impor, mulai dari beras, gula, garam hingga perikanan.” Ucap Legislator FPKS ini menyayangkan.

Slamet juga menyampaikan refleksinya dalam peringatan Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September. Bila diulas kembali, kekuatan maritim memang menjadi salah satu poros utama kampanye Jokowi 7 tahun silam. Namun hingga kini kondisi maritim nasional belum ada perubahan berarti.

“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah terbitnya PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang

dikenakan di lingkungan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah mengerek tambahan pungutan kepada nelayan serta terbitnya aturan KKP No 17 Tahun 2021 yang menindas keberadaan nelayan.” Ujar Slamet.

Slamet juga mengulas KKP No 17 dengan aspirasi masyarakat usai melaksanakan reses di Dapil Jawa Barat IV bahwa aturan KKP tersebut membunuh mata pencaharian nelayan penangkap benih lobster. KKP juga belum memberikan solusi yang tepat terkait pelanggaran penangkapan BBL (Benih Bening Lobster) sehingga para nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

“Jangan sampai aturan yang ada justru membuka potensi konflik antara nelayan dengan aparat penegak hukum. Kami mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden untuk memenuhi janji-janji kampanyenya khususnya terkait kedaulatan pangan dan maritim nasional.” tegas politisi PKS ini.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Sampai di tahun ketujuh ini janji Jokowi hanyalah janji belaka. Sejauh ini, pengeluaran sumber pangan dalam negeri justru berasaldari impor, mulai dari beras, gula, garam hingga perikanan”

# Aleg PKS Desak Pemerintah **Lebih Proaktif** dalam Kasus Myanmar dan Laut China Selatan

## KUTIPAN

Jakarta (01/11) — Legislator Fraksi PKS DPR RI, Sukamta memberikan interupsi di tengah jalannya Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2021-2022.

Sukamta menggarisbawahi kasus kudeta di Myanmar dan Laut China Selatan.

"Adanya junta militer yang membunuh rakyat Myanmar ini harus diberikan perhatian lebih serius. Kalau dibiarkan oleh ASEAN khawatir akan mengakibatkan destabilisasi kawasan." Tegaskan Komisi I DPR RI ini.

ASEAN seharusnya bisa bersikap lebih tegas agar permasalahan kudeta di Myanmar tidak menjadi Suriah kedua di Asia Tenggara.

Sukamta juga mendorong agar ASEAN bersama PBB data menggalang misi perdamaian agar bisa menyelamatkan

demokrasi di Myanmar dan melindungi rakyatnya.

Situasi di Laut China Selatan semakin memanas dan tidak pasti. Kasus yang sudah lama terjadi ini membutuhkan keseriusan para pimpinan agar situasi tidak kembali memanas dengan negara-negara Asia Timur.

"Indonesia merupakan 'The Big Brother of ASEAN', negara terbesar yang selama ini dianut oleh negara lain. Oleh karena itu, sikap proaktif pemerintah dalam menggalang, mengimbu dan mengambil langkah lebih serius agar suasana tidak semakin memanas." Pungkas Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DI Yogyakarta

"Kebangkrutan Garuda bukan semata-mata akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan oleh tindakan moral hazard manajemen Garuda selama bertahun-tahun yang membebani Garuda hingga saat ini

# Dilantik sebagai PAW, Diah: Perjuangan di DPR untuk Meringankan Beban Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (1/11) — Diah Nurwitasari resmi dilantik sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) Fraksi PKS.

Pelantikannya dilakukan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II 2021-2022 pada Senin (1/11) siang di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, melalui pembacaan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 117/P, Nomor 119/P dan Nomor 125/P Tahun 2021.

Diah dilantik untuk menggantikan Almarhum Adang Sudrajat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Bagi Diah, amanah ini menjadi jalannya untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan Almarhum Adang khususnya bagi masyarakat di Dapilnya serta masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara umum.

“Harapan saya ke depan, selain melanjutkan kebaikan-

kebaikan Almarhum, saya juga berharap lebih mampu untuk berbuat untuk masyarakat,” ungkap Diah.

Perempuan yang aktif sebagai Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Jawa Barat ini menambahkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi DPR sebagaimana disampaikan pada Paripurna akan menjadi fokus utamanya selama masa jabatannya, salah satunya adalah tentang ketahanan pangan.

“Di daerah saya sendiri juga memang sebetulnya salah satu daerah yang ke depannya bisa melakukan swasembada pangan, karena modal dasarnya sangat dimiliki oleh Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” ujar perempuan kelahiran 24 Oktober 1967 ini.

Harapan Diah, pelantikannya sebagai anggota PAW akan membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dari Dapilnya di Jawa Barat II, serta di Indonesia secara umum. Diah bertekad untuk menyuarakan suara-suara rakyat dan berusaha mengawal kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat di masa depan.

Diah merupakan satu dari lima anggota DPR RI baru yang dilantik pada Masa Persidangan II 2021-2022 ini. Anggota PAW lainnya adalah Paulus Ubrungge dari PAN mewakili Daerah Pemilihan Papua, Aida Muslimah dari PDIP mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, Harris Turino dari PDIP mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, serta Novri Ompusungu dari PDIP mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II.



**Hj. DIAH NURWITASARI, Ml.Pol.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

“Berbagai tantangan yang dihadapi DPR sebagaimana disampaikan pada Paripurna akan menjadi fokus utamanya selama masa jabatannya, salah satunya adalah tentang ketahanan pangan. Di daerah saya sendiri juga memang sebetulnya salah satu daerah yang ke depannya bisa melakukan swasembada pangan, karena modal dasarnya sangat dimiliki oleh Kabupaten Bandung dan Bandung Barat

# Nasir Djamil Serap Aspirasi Masyarakat Aceh Terkait Dana Otonomi Khusus

## KUTIPAN

Wacana revisi Undang-Undang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berisi tindak lanjut perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka juga cukup hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat.

Jakarta (01/11) — Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil menyoroti dana otonomi khusus agar tidak kembali sia-sia ketika diwawancarai dalam segmen PKS Legislative Report Edisi Rapat Paripurna pada Senin pagi (01/11/2021).

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD Aceh kurang lebih berjumlah 4 triliun. Saya berharap dana tersebut dapat dioptimalkan sebagaimana aspirasi masyarakat agar perekonomian bisa bergerak. Terutama sebagai upaya meminimalisir

potensi kejahatan yang terjadi di Aceh.” Ucap Legislator Dapil Naggroe Aceh Darussalam II tersebut.

Usai melaksanakan reses, Anggota Dewan Fraksi PKS tersebut menyampaikan bahwa isu kriminalitas menjadi salah satu isu yang krusial di Aceh. Pasalnya, isu tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan dengan jatuhnya korban jiwa.

“Optimalisasi anggaran pada sarana dan prasarana di beberapa kabupaten dan kota juga perlu untuk diperhatikan. Apalagi saya melihat bahwa isu banjir ini sangat krusial, dengan memasifkan reboisasi di daerah

rawan banjir harapannya ‘prolem’ lama ini segera selesai” Sambung Nasir.

Wacana revisi Undang-Undang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berisi tindak lanjut perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka juga cukup hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat.

Di akhir wawancara, Nasir menegaskan bahwa perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan posisi Aceh sebagai daerah berotonomi khusus, utamanya dalam pemberian ruang fiskal untuk melakukan terobosan pembangunan demi perbaikan ekonomi.



## H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II

“Optimalisasi anggaran pada sarana dan prasarana di beberapa kabupaten dan kota juga perlu untuk diperhatikan. Apalagi saya melihat bahwa isu banjir ini sangat krusial, dengan memasifkan reboisasi di daerah rawan banjir harapannya ‘prolem’ lama ini segera selesai”

# Aleg Fraksi PKS **Konsisten** Perjuangkan Hak Honorer

## KUTIPAN

Jakarta (8/11) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyoroti hak honorer dalam PKS Legislative Report pada Sidang Paripurna ke-9 masa sidang II Tahun 2021-2022 yang digelar Senin (8/11/2021) pagi.

"Sudah dua periode dan menjadi wakil ketua Komisi X DPR RI, sehingga saya tau betul dan mengikuti dinamika terhadap isu honorer", ujar Fikri.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa terdapat dua skema honorer, yaitu CPNS dan PPPK. Namun, karena kondisi keuangan negara yang tidak stabil, salah satunya karena Pandemi Covid-19 dan situasi global. Maka skema honorer terbagi menjadi tiga, yaitu CPNS, PPPK, atau honorer dengan UMK/UMR.

"Sikap PKS jelas calon PNS tidak ada yang tidak diterima. Seleksi hanya untuk

menggolongkan mereka, misalnya terkait dengan umur. Honorer itu bukan mendaftar, mereka sudah bekerja dan tinggal menjelaskan statusnya saja", tegas Legislator Dapil Jawa Tengah tersebut.

Wakil ketua Komisi X DPR tersebut juga mengingatkan kepada semua pihak terutama kepada pemerintah bahwa honorer bukan hanya diberikan kepada profesi guru dan tenaga pendidikan. Tetapi, terdapat profesi lain baik di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Sikap PKS jelas calon PNS tidak ada yang tidak diterima. Seleksi hanya untuk menggolongkan mereka, misalnya terkait dengan umur. Honorer itu bukan mendaftar, mereka sudah bekerja dan tinggal menjelaskan statusnya saja"

# Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, **Politisi PKS : Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi**

**KUTIPAN**

Jakarta (8/11) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyoroti terkait beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19. Ia menyampaikan hal tersebut pada Sidang Paripurna masa sidang II tahun sidang 2021-2022 yang dilaksanakan Senin (8/11) Pagi.

"Menyadari bahwa Gelombang kenaikan Kasus Covid-19 pada Juni-Juli Varian delta tidak serta merta menjadikan kelonggaran sepenuhnya tidak diperhatikan", Ungkap Netty Prasetiyani seperti yang diketahui bahwa kasus Covid-19 mengalami kenaikan jumlah kasus yang mengakibatkan adanya kebijakan terkait PPKM dan pembatasan terhadap segala jenis kegiatan.

"Kelonggaran yang diberikan justru harus diawasi mengingat kerumunan dan mobilitas yang besar cenderung terjadi", Ujar Netty.

Kebijakan Kelonggaran ataupun adanya relaksasi dari Pemerintah perlu untuk diwaspadai, mengingat Dibeberapa wilayah kelonggaran dari PPKM semakin diberi angin segar.

"Apabila kebijakan tersebut dilakukan maka kapasitas dari setiap kegiatan masyarakat perlu ditinjau kembali, mulai dari kapasitas Mall, Transportasi Umum, maupun lokasi dimana seringkali terjadi kerumunan harus mendapat perhatian dari pemerintah." Pungkas Netty Diketahui juga bahwa

terkait vaksinasi maka perlu mengawasi dan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, Ibu hamil dan anak-anak di bawah umur

"Akselerasi harus dilakukan kepada kelompok rentan, agar dapat mencapai tujuan peningkatan pada Herd Imunitas", Ujar Netty.

Selanjutnya legislator PKS tersebut menyampaikan bahwa pemerintah diharapkan dapat mencapai target herd imunitas sebelum akhir tahun 2021, mengingat adanya kemungkinan terjadi gelombang kenaikan seperti sebelumnya.

"Jangan sampai kebijakan diambil dengan atas nama Pemulihan Ekonomi Nasional akan tetapi justru mengabaikan keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi." tutup Netty



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pemerintah diharapkan dapat mencapai target herd imunitas sebelum akhir tahun 2021, mengingat adanya kemungkinan terjadi gelombang kenaikan seperti sebelumnya. Jangan sampai kebijakan diambil dengan atas nama Pemulihan Ekonomi Nasional akan tetapi justru mengabaikan keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi"

# RUU Perlindungan Data Pribadi Aleg PKS: Agenda Paling Penting

## KUTIPAN

Jakarta (8/11) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyampaikan terkait penetapan calon panglima TNI sekaligus menyoroti RUU perlindungan Data Pribadi yang perlu disegerakan. Ia menyampaikan hal tersebut pada Sidang Paripurna masa sidang II tahun sidang 2021-2022 yang dilaksanakan Senin (8/11) Pagi.

"Seperti yang kita ketahui bersama atas persetujuan DPR RI terhadap Jenderal Andika Perkasa yang menjadi Calon Panglima TNI." Ujar Sukamta. Selanjutnya, dalam komisi 1 DPR RI terdapat beberapa agenda yang akan dibahas salah satunya yang menjadi agenda penting yaitu terkait dengan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi yang perlu diberi perhatian khusus.

"Saat ini, di komisi 1 kita punya target yaitu terkait RUU perlindungan data pribadi yang dapat disegerakan." ujar Sukamta

Berdasarkan yang diketahui oleh Publik bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang menjadi penting, mengingat di era globalisasi saat ini, kejahatan dunia maya marak terjadi yang ditimbulkan oleh data pribadi yang seringkali bocor atau di salahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Oleh Karena itu, RUU perlindungan data pribadi akan terus di suarakan guna menjaga kepentingan rakyat agar terhindar dari adanya penyalahgunaan", Tutup Sukamta



## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Berdasarkan yang diketahui oleh Publik bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang menjadi penting, mengingat di era globalisasi saat ini, kejahatan dunia maya marak terjadi yang ditimbulkan oleh data pribadi yang seringkali bocor atau di salahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh Karena itu, RUU perlindungan data pribadi akan terus di suarakan guna menjaga kepentingan rakyat agar terhindar dari adanya penyalahgunaan",



***Mari Tetap  
Patuhi Protokol  
Kesehatan***

# Legislator PKS: Rumah dan Kendaraan Dinas Siap Layani Rakyat Riau di Ibu Kota

## KUTIPAN

Jakarta (10/11) - Anggota DPR RI dapil Riau Syahrul Aidi Maizat menyampaikan pernyataan terkait komitmennya mengayomi masyarakat Riau yang berada di Jakarta pada (10/11/2021) di rumah dinas, yang berlokasi di Komplek DPR Rawajati Kalibata No A3-23 melalui video rilisnya.

"Bersama saya adinda Joko dari Kampar Kiri Tengah, Desa Mayang Pongkai yang dulu pernah kecelakaan patah tujuh dan tangannya sampai sekarang belum bisa digerakkan," Ujar Politisi asal Riau II tersebut.

Oleh karena itu, Syahrul dengan keteguhan hatinya memberikan kesempatan kepada masyarakat daerahnya untuk dapat melapor dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada dirinya. Karena hal tersebut juga sudah pernah ia sampaikan dalam janji pemilunya terdahulu.

"Sekarang ini juga ada masyarakat kita dari Sungai Apit, Kabupaten Siak yang anaknya menderita kanker hati dan harus dioperasi pencabutan hati," Tambah Syahrul.

Terkait hal tersebut, Syahrul sangat berharap dengan adanya rumah dinas, kendaraan dinas, dan pelayanan yang mereka berikan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat dari daerah pemilihannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. SYAHRUL  
AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Hari ini saya kedatangan tamu dari Siak. Sepasang suami istri ini datang ke Jakarta dalam rangka pengobatan anaknya yang berusia sepuluh bulan yang akan melakukan transplantasi hati. Insyaallah selama masa pengobatan, keluarga ini akan menginap di rumah dinas kita di RJA Kalibata. Semoga pertolongan kita dapat meringankan beban mereka. Aamiin

# Di Hari Pahlawan, Aleg PKS Terima Audiensi dari Pahlawan Pendidikan

## KUTIPAN

Bandung (10/11) --- Anggota Komisi II DPR RI FPKS, Teddy Setiadi, menerima audiensi guru-guru honorer Kategori 2 (K2) di Kota Bandung.

Bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, beberapa perwakilan guru honorer diterima langsung teddy di rumah aspirasinya di Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan guru honorer menyampaikan terkait permasalahan guru honorer K2 yang masih terkatung-katung.

Perlu diketahui, Guru honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi PPPK pada 2018-2019. Namun sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.

"Guru adalah pahlawan

masa kini, mereka adalah pahlawan pendidikan yang harus kita apresiasi. Guru Honorer K2 ini telah mengabdikan puluhan tahun, dedikasi dan pengalaman mereka dalam mendidik anak bangsa sudah teruji. Pemerintah harus punya target, kapan Honorer K2 ini diselesaikan," tegas Teddy.

Teddy mendorong agar pemerintah segera menuntaskan permasalahan guru honorer K2 dan memperhatikan kesejahteraannya

"Saya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan penyelesaian permasalahan guru honorer K2 ini di parlemen bersama anggota dewan yang lain," tutup Teddy.



**TEDDY SETIADI, S.Sos.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Guru adalah pahlawan masa kini, mereka adalah pahlawan pendidikan yang harus kita apresiasi. Guru Honorer K2 ini telah mengabdikan puluhan tahun, dedikasi dan pengalaman mereka dalam mendidik anak bangsa sudah teruji. Pemerintah harus punya target, kapan Honorer K2 ini diselesaikan,"



### Profil

- Nama Lengkap  
**Dr. H. Mulyanto, M.Eng**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Jakarta, 26 Mei 1963**
- Dapil  
**Banten III**  
(Kab. Tangerang,  
Kota Tangerang,  
Kota Tangerang  
Selatan)



### Pendidikan

- **SMAN 10 Jakarta,**  
1978 – 1981
- **S1 Fakultas MIPA,**  
**Jurusan Fisika,**  
**Univ. Indonesia.** 1981–1987
- **S2 Teknik Nuklir, Tokyo**  
**Institute of Technology.**  
1990–1992
- **S3 Teknik Nuklir, Tokyo**  
**Institute of Technology.**  
1992–1995



### Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI FPKS,** 2019–sekarang
- **Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia,**  
Sebagai : Deputi Kelembagaan Iptek. 2013–2015
- **Perum Jasa Tirta I, Anggota Dewan Pengawas.** 2011–2015
- **Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia,**  
Sebagai : Sekretaris Kementerian. 2010–2013
- **PT. Pertani,** Sebagai : Komisaris Utama. 2009–2011
- **Departemen Pertanian Republik Indonesia,**  
Sebagai : Inspektur Jenderal. 2008–2010
- **Departemen Pertanian Republik Indonesia,**  
Sebagai: SAM Sistem Informasi & Pengawasan. 2005–2008



# MULYANTO

Facebook : Pak Mul    Twitter : @pakmul63  
Instagram : @pakmul63  
YouTube : Dr. Mulyanto M. Eng



### Keluarga

- Istri : **Ritta Purbowati, SE.**
- Anak : **1 Laki-Laki**  
**2 Perempuan**



### Riwayat Organisasi

- **Ketua Center for Strategic Development Studies (CSDS),** 2015–2019
- **Anggota Forum 3 Pilar Kemitraan,** 2007–2010
- **Alumni Lemhanas RI,** Sebagai: PPSA XV. 2007–sekarang
- **Pendiri Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI),** 1998–sekarang
- **ISTECS (Institute for Science and Technology Studies),** Sebagai : Ketua. 1996–2004
- **Muslim Student Association Japan (MSA-J),** Sebagai : Central Executive Committee. 1994–1995
- **Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jepang – Pasifik,** Sebagai: Ketua Divisi Pembinaan Umat. 1994–1995
- **Islamic Network (ISNET),** Sebagai: Anggota Majelis Syuro dan Ketua Komisi Tarbiyah. 1993–1995
- **Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia,** Sebagai: Anggota. 1982–1983
- **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),** Anggota. 1981–1982

# HNW Ajak Pemuda Betawi Lestarkan Budaya Leluhur, Termasuk Pantun

## KUTIPAN

Jakarta (11/11) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak generasi muda betawi untuk melestarikan budaya leluhur seperti pantun.

Menurutnya, mencintai seni budaya merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur, termasuk pahlawan bangsa.

"Karena berpolitik yang baik adalah berbasiskan pada akar budaya, dan mementingkan seni dengan terus menerus menjaga dan memperjuangkannya. Untuk itulah kami di PKS telah menyelenggarakan kegiatan apresiasi pencak silat betawi, lomba hadrah, lomba Rawi Simtudduror, dan kini kami selenggarakan lomba pantun Betawi, sebagai bentuk dukungan nyata PKS terhadap seni budaya di Indonesia," tutur HNW dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).

Hal ini dia ungkapkan saat menggelar lomba pantun Betawi untuk menyambut Hari Pahlawan 10 November. Lomba diselenggarakan bekerja sama dengan Perisai Kebudayaan dan seni Betawi serta Gema

Keadil-an DKI Jakarta, Minggu (7/11).

Turut hadir dalam pelaksanaan lomba tersebut, Plt. Sekretaris Wali Kota Jakarta Selatan Mukhlisin, Kasudin Kebudayaan Jakarta Selatan Sholahudin, Ketua Perisai Kebudayaan dan Seni Babe Doel, dan Ketua DPW Gema Keadilan DKI Jakarta Wawan.

HNW menyebut partai politik perlu mengambil peran pelestarian seni budaya. Pada kesempatan tersebut, HNW memberikan 6 buah pantun. Di antara pantunnya adalah gubahan pribadi, menyoal keberpihakan PKS pada kegiatan seni pantun Betawi.

"Hari ini kita ke rumah Bang Madun, orangnya suka pepes tutur katanya nan ramah. Hari ini kita buka lomba pantun, tanda cinta PKS pada budaya Nusantara nan selalu indah," seru Hidayat.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Perisai Kebudayaan dan Seni Betawi Babe Doel dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada PKS yang mendukung kegiatan seni budaya khususnya kegiatan pantun Betawi. Ia mengingatkan masyarakat Betawi khususnya kaum pemuda untuk terus melestarikan seni budaya, sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara, serta untuk menjalin persaudaraan ssama warga.

"Kita bukan cuma cinta budaya, tapi dengan budaya kita bersatu dan kompak untuk memajukan seni budaya betawi. Dengan berbudaya akhirnya kita jalin silaturahmi," kata Bang Doel.

Plt. Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin menambahkan pantun merupakan salah satu seni budaya Betawi yang harus dilestarikan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Dengan melestarikan budaya betawi sebagaimana yang dilakukan oleh PKS, ujarnya, semangat cinta budaya dan nasionalisme warga tentu akan semakin terpujuk.

"Pelestarian budaya harus



## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Karena berpolitik yang baik adalah berbasiskan pada akar budaya, dan mementingkan seni dengan terus menerus menjaga dan memperjuangkannya. Untuk itulah kami di PKS telah menyelenggarakan kegiatan apresiasi pencak silat betawi, lomba hadrah, lomba Rawi Simtudduror, dan kini kami selenggarakan lomba pantun Betawi, sebagai bentuk dukungan nyata PKS terhadap seni budaya di Indonesia

dilaksanakan oleh semua kalangan. Jika dulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, kini perjuangan yang harus

dilakukan adalah melestarikan kebudayaan lokal agar tidak tergerus kemajuan zaman, khususnya bagi generasi muda," urai Mukhlisin.

# Nevi Zuairina Bersilaturahmi dengan Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia di Padang Pariaman

## KUTIPAN

Padang Pariaman (02/11) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina bertemu dengan Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI), di Sungai Limau, Padang Pariaman.

Kegiatan yang mayoritas dihadiri para remaja ini membuat Nevi merasa bangga, karena generasi penerus ini masih semangat untuk bergerak dan beraktivitas, dalam rangka meningkatkan kapasitas diri baik keilmuan maupun keterampilan berorganisasi.

"Kegiatan silaturahmi di Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan undangan dari masyarakat, sebelum masuk masa persidangan di DPR RI. Bersilaturahmi dengan para pemuda pemudi yang tergabung dalam wadah JPRMI

ini merupakan salah satu rangkaian keliling kegiatan di kabupaten Padang Pariaman", Kata Nevi.

Politisi PKS ini setelah bertemu dengan para pemuda - pemudi yang terus belajar meningkatkan kapasitas diri merasa yakin, bahwa masa depan bangsa Indonesia ini akan ada penerus yang tetap berkualitas. Untuk itu ia memesankan kepada para remaja yang hadir pada pertemuan agar senantiasa terus meningkatkan kualitas diri sekaligus mempertahankan idealisme yang akan selalu ada

berturan dari masa ke masa.

Anggota DPR RI yang saat ini duduk di Komisi VI ini melanjutkan, bahwa negara ini akan terus membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi. Semakin kokoh idealisme orang-orang yang mengisi berlangsungnya negara Indonesia, akan semakin besar kesempatan Bangsa Indonesia menjadi pemeran penting dalam peradaban dunia.

"Sejarah itu akan abadi di dunia ini, dikenang keturunannya kita hingga ribuan tahun. Namun sejarah itu ada yang cemerlang, ada pula yang kelam. Untuk itu, mari kita semua terutama para pemuda pemudi yang tergabung dalam JPRMI, dimasa yang akan datang dapat menorehkan sejarah yang dengan penuh kebanggaan menjadi kenangan anak cucu kita di masa depan", tutup Nevi Zuairina.



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Kegiatan silaturahmi di Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan undangan dari masyarakat, sebelum masuk masa persidangan di DPR RI. Bersilaturahmi dengan para pemuda pemudi yang tergabung dalam wadah JPRMI ini merupakan salah satu rangkaian keliling kegiatan di kabupaten Padang Pariaman



# Hadiri Peringatan Maulid di Dapil, Aleg PKS **Dukung** Lomba Shalawat Ibu-ibu Majelis Taklim

## KUTIPAN

Tasikmalaya (10/11) — Dalam rangka menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, Rumah Keluarga Indonesia (RKI) DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya menggelar rangkaian kegiatan. Mulai dari Tabligh Akbar Virtual hingga lomba pembacaan shalawat. Semuanya digelar secara virtual melalui aplikasi zoom.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, terbukti dengan puluhan peserta dari seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk Anggota DPR RI Toriq Hidayat yang menjadikan rumah aspirasinya sebagai kegiatan pengumuman juara lomba shalawat virtual pada tanggal 7 November 2021.

“Saya sangat mengapresiasi semangat panitia dan peserta khususnya pada kegiatan lomba shalawat ini. Silahkan Rumah aspirasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif oleh siapa saja. Yang penting kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat. Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Politisi PKS ini.

Dalam sambutannya, Toriq menyampaikan kondisi Indonesia dimasa pandemi. Khususnya, perekonomian dan kesehatan yang turun drastis. Namun ia mengingatkan setiap orang beriman harus terus optimis dan ikhtiar. Salah satunya adalah dengan memperkuat generasi penerus bangsa.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai religi terutama di kalangan anak-anak muda, khususnya dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H.

Membentuk generasi yang mencintai dan dicintai Allah SWT. Berikutnya mencintai Rasulullah SAW,” tuturnya.

Menurutnya membaca sholawat merupakan bentuk minimal dalam mencintai Rasul SAW. Namun demikian setiap 1 kali membaca sholawat keberkahan yang didapatkan sangat berlipatganda. Berupa pahala sebesar 10 kali lipat, keberkahan dari Allah SWT dan doa malaikat, sekaligus menghapus dosa.

“Saya berharap kegiatan syiar Islam ini dapat berlanjut terus. Dan keberkahannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kalau saat ini, kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan covid-19. Semoga ke depannya saat kondisi normal kembali, penyelenggaraannya dapat dilaksanakan lebih optimal lagi,” ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Anggota DPRD FPKS Kabupaten Tasikmalaya, BPTD PKS Kabupaten Tasikmalaya serta Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama setempat, Toriq mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba Sholawat Nabi.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Saya sangat mengapresiasi semangat panitia dan peserta khususnya pada kegiatan lomba shalawat ini. Silahkan Rumah aspirasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif oleh siapa saja. Yang penting kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya”

“Bagi para pemenang lomba. Adi Patrahida Juara 1, Al Khoeriyah juara 2 dan Assurur Juara 3 prestasinya harus terus ditingkatkan dan dipertahankan. Yang terpenting, senanti-

asa melantunkan sholawat sebagai pengingat untuk melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Dan bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari,” tutupnya.

# Dukung UMKM Maju dan Naik Kelas, Rofik Serahkan Bantuan Alat Hasil Diseminasi Teknologi

## KUTIPAN

Purbalingga (09/11) --- Anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto menyerahkan bantuan alat diseminasi teknologi kepada pelaku UMKM pangan dan perikanan dari 3 kabupaten di daerah pemilihannya, yakni: Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

Penyerahan bantuan alat hasil diseminasi teknologi itu merupakan kerja sama antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan Komisi VII DPR RI. Penyerahan dilakukan di aula Rumah Berdaya di Blater Kalimantan Purbalingga, Senin (08/11/2021).

Ketua tim pengusul Enda Apriyani mengatakan, usulan tersebut sudah rutinitas setiap tahun dengan BRIN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya para pelaku UMKM.

"Mudah-mudahan ke depan setiap tahun program ini lebih banyak menjangkau masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan

kapasitas produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Enda.

Perwakilan penerima Saiful Munif dari Paguyuban Bubur Sumsung Numani Kedungmenjangan Purbalingga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rofik Hananto yang telah memfasilitasi bantuan peralatan UMKM kepada kelompoknya.

"Terima kasih atas bantuan peralatan ini. Kami punya 40 anggota dan jualan Bubur di seluruh Purbalingga," ujarnya.

Sekretaris Dinkop dan UMKM Istiyati mengatakan, pemberian bantuan peralatan untuk UMKM melalui Rofik Hananto ini adalah kali ketiga.

Ini menunjukkan kepedulian Rofik kepada UMKM. Apalagi dari sejak tahun 2007 Rofik sudah peduli dengan UMKM sampai sekarang.

"Terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto. Banyak permasalahan yang dihadapi UMKM, termasuk bidang teknologi produksi. Alhamdulillah Bapak Rofik Hananto bisa menjembatani peralatan produksi untuk UMKM," katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program dari BRIN yang bekerjasama dengan Komisi 7 DPR RI untuk mendukung UMKM di 3 kabupaten yang masuk dapil Jawa Tengah VII.

"Tujuannya sebagai daya dorong dan daya dukung UMKM agar lebih maju, lebih mandiri, bahkan bisa naik kelas dengan teknologi inovasi. Selain dengan SDM yang unggul, modal, akses pasar dan akses teknologi agar semakin efisien dan bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih," jelasnya.



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Kegiatan tersebut merupakan program dari BRIN yang bekerjasama dengan Komisi 7 DPR RI untuk mendukung UMKM di 3 kabupaten yang masuk dapil Jawa Tengah VII. Tujuannya sebagai daya dorong dan daya dukung UMKM agar lebih maju, lebih mandiri, bahkan bisa naik kelas dengan teknologi inovasi



# Nur Azizah Gulirkan 100 Bantuan Rehabsos Rumah Tidak Layak Huni di Dapil

## KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., gelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rehabsos RTLH) Tahun 2021.

Acara ini di selenggarakan di Ruang Pertemuan, Kantor Walikota Depok di Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas – Kota Depok pada Senin, (8/11). Kegiatan Bimtek ini berlangsung atas Kerjasama Nur Azizah Bersama pihak Kemensos RI, Pemerintah Kota Depok dan Dinas Sosial Kota Depok.

Program Rehabsos RTLH ini merupakan program yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Kemensos RI melalui Rekomendasi Khusus Nur Azizah untuk 100 KPM di Kota Depok dan Kota Bekasi. Yang terbagi menjadi 80 KPM di Kota Depok dan 20 KPM di Kota Bekasi.

Melalui Program ini, Nur

Azizah telah menggulirkan dana APBN senilai 2 Milyar untuk masyarakat di Depok dan Bekasi guna merehabilitasi Rumah warga yang tidak layak huni, mejadi layak huni.

Pada kesempatan ini turut hadir Wakil Walikota Depok, IR. H. Imam Budi Hartono, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Drg. Asloe'ah Madjri, Sub Koordinator Penguatan Fakir Miskin Wilayah 1 Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Haruman Hendarsah, Lurah Pancoran Mas, Lurah Tugu, Lurah Curug, Lurah Kalimulya, Lurah Jatimulya, Lurah Cisolak dan Lurah Mekarjaya, serta Perwakilan 30 KPM.

Pada Kesempatan ini, Nur Azizah turut menjelaskan

bahwa tahun ini pihaknya melalui Kemensos mencanangkan perbaikan RTLH di dua daerah yaitu Bekasi dan Depok yang merupakan Dapil Nur Azizah. Ini merupakan program yang juga di gulirkan oleh seluruh anggota Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 50 orang di dapilnya masing-masing.

“Dengan total keseluruhan mencapai 100 unit, rinciannya 80 unit rumah di Kota Depok dan Bekasi 20 unit rumah. Saat ini Rehabsos RTLH di Kota Depok baru terealisasi 30 unit rumah dari 80. Inshaallah akhir tahun ini semua terealisasi, karena itu menggunakan APBN 2021.” kata Nur Azizah.

Program ini turut mendapatkan apresiasi dari Ir. H. Imam Budi Hartono selaku Wakil Walikota Depok, ia mengapresiasi Nur Azizah atas kepeduliannya membangun kesejahteraan warga Depok, salah satunya melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

30 KPM yang sudah menerima pencairan dana untuk Rehabsos RTLH ini masing-masing sebanyak 20 juta rupiah, sedangkan sisanya menyusul.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Dengan total keseluruhan mencapai 100 unit, rinciannya 80 unit rumah di Kota Depok dan Bekasi 20 unit rumah. Saat ini Rehabsos RTLH di Kota Depok baru terealisasi 30 unit rumah dari 80. Inshaallah akhir tahun ini semua terealisasi, karena itu menggunakan APBN 2021”



Agar Teradvokasi di Proyek KCJB

# Diah Nurwitasari Akan Tinjau Hak Masyarakat KBB

**KUTIPAN**

Jakarta (02/11) — Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II Diah Nurwitasari akan meninjau kembali hak masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, apakah telah teradvokasi sudah baik dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meskipun dalam proses kebijakan tidak terlibat dikarenakan menjadi Proyek Strategis Nasional, namun menurutnya, masyarakat di kabupaten tersebut mengalami dampak pembangunan.

“Dulu sempat juga naik adanya protes dari masyarakat. Karena itu, saya akan cek kembali ke masyarakat apa sudah teradvokasi dengan baik oleh pemerintah setempat,” ujar Diah usai dilantik menjadi Anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).  
Diketahui, Kabupaten

Bandung Barat menjadi salah satu kabupaten yang akan dilalui rel proyek KCJB. Yaitu, terdapat terowongan 6 (tunnel 6) sepanjang 4.478 meter di Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, dengan progres tertinggi per 17 Oktober 2021 sepanjang 4.204 meter.

Pada Februari 2021 silam, beberapa warga di Desa Cikalong, Cikalongwetan, di Bandung Barat mengaku mulai merasakan dampak kekeringan. Warga menyebutkan sumber mata air Sumumpung yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tersebut diduga kering karena diduga terdampak dari proyek KCJB.



**Hj. DIAH NURWITASARI, Ml.Pol.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

“Dulu sempat juga naik adanya protes dari masyarakat. Karena itu, saya akan cek kembali ke masyarakat apa sudah teradvokasi dengan baik oleh pemerintah setempat,”

# Live Interactive

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



## Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



# Kunker, Rafli Temui Bupati Aceh Selatan **Bahas** Keberadaan Korporasi

## KUTIPAN

Tapaktuan (07/11) --- Anggota DPR RI asal Aceh Rafli temui Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran di Pendopo Kabupaten setempat, kawasan Tapaktuan, Rabu (03/11).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari agenda kunjungan kerja anggota komisi VI DPR RI itu ke daerah pemilihan (DAPIL) 1 Aceh.

Rafli pada kesempatan sore tadi menyampaikan, "Komunikasi tadi merupakan kesepakatan harapan kita kedepan diantaranya bisa memulai sejumlah masterplan Agrowisata di Aceh Selatan, salah satu nya sedang kita garap jalan Pantan Anduang, Pantan Luas, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan " Ujarnya usai rapat.

Kesempatan tadi juga, ia menyinggung kontribusi sosial dan lingkungan terhadap keberadaan sejumlah Perusahaan di Aceh Selatan.

"Kita juga berkomunikasi dan terkait kontribusi sosial dan lingkungan terhadap keberadaan beberapa perusahaan, seperti PT ASN, PT ASDAL, dll," sebutnya.

"Kita harap semua berperan dan berkontribusi mendukung pembangunan wabil khusus Aceh Selatan, dan Aceh pada umumnya, semua akan kita tinjau ulang" Tutup Rafli.

Amatan media kunjungan Rafli, tadi di dampingi oleh Ketua DPD PKS Aceh Selatan, Ustad Azmi S.Pd.I, beserta staff anggota DPR RI yang tergabung dalam rombongan kunjungan kerjanya. Hadir juga mendampingi Bupati Tgk Amran, asisten II Teuku Darisman.



**RAFLI**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Kita juga berkomunikasi dan terkait kontribusi sosial dan lingkungan terhadap keberadaan beberapa perusahaan, seperti PT ASN, PT ASDAL, dll, Kita harap semua berperan dan berkontribusi mendukung pembangunan wabil khusus Aceh Selatan, dan Aceh pada umumnya, semua akan kita tinjau ulang"

Silaturahmi dengan Anggota Perempuan PKS

# Anis Tekankan Pentingnya Berbau dan Beri Manfaat di Masyarakat

## KUTIPAN

Jakarta (03/11) — Anggota perempuan PKS adalah 'kader partai' yang tangguh. Kiprahnya di masyarakat selalu yang terdepan. Meskipun PKS merupakan partai oposisi, tetapi dalam menyelesaikan problematika di masyarakat selalu sigap dan terdahulu melayani masyarakat.

Demikian disampaikan Anis Byarwati, Anggota DPR-RI Komisi XI F-PKS, dalam silaturahmi bersama Anggota Perempuan PKS Penggerak di Masyarakat pada Ahad (31/10/2021).

Dalam pertemuan yang digelar secara virtual bertema 'Peran dan Kiprah Perempuan PKS di Lingkungan Kemasyarakatan' yang diselenggarakan bekerja sama dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Jakarta Timur ini, Anis hadir dalam rangka berbagi pengalaman dengan mereka.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menjelaskan dua unsur pokok

dalam pemberdayaan masyarakat ala PKS. Pertama adalah masyarakat yang mau menerima kehadiran anggota PKS dan kedua adalah para penggerak yang diperankan oleh anggota PKS di masyarakat.

"Tidak ada artinya kualitas anggota yang bagus dan militan, tetapi tidak bergerak atau tidak diterima di masyarakat. Anggota partai ibarat sebuah pesawat terbang dan masyarakat adalah landasannya.

Secanggih apapun pesawat terbang, ia butuh landasan untuk mendarat. PKS adalah partai yang butuh masyarakat. Kerja-kerja anggotanya harus bersama, dari dan untuk

masyarakat," papar Anis.

Lebih lanjut, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan bahwa tingkat kebutuhan anggota kepada masyarakat sangat besar. Anggota PKS adalah bagian dari masyarakat dan harus beraktivitas bersama masyarakat.

"Kita fokus saja pada melayani masyarakat. Jika kita bekerja dengan hati melayani masyarakat, maka masyarakat akan menerima dengan sepenuh hati juga," kata Anis.

Anis bahkan menegaskan bahwa suara-suara sumbang tentang PKS akan sirna dengan sendirinya jika anggota PKS terus bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan niat yang ikhlas.

"Jangan ada jarak antara kita dengan masyarakat. Kita rangkul seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal perbedaan. Karena misi kita adalah menebarkan kebaikan", ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Tidak ada artinya kualitas anggota yang bagus dan militan, tetapi tidak bergerak atau tidak diterima di masyarakat. Anggota partai ibarat sebuah pesawat terbang dan masyarakat adalah landasannya. Secanggih apapun pesawat terbang, ia butuh landasan untuk mendarat. PKS adalah partai yang butuh masyarakat. Kerja-kerja anggotanya harus bersama, dari dan untuk masyarakat

# Gerakkan Ekonomi Kerakyatan, Johan Dukung Desa Pamanto di NTB jadi Kantung Sarang Walet

## KUTIPAN

Sumbawa (05/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengapresiasi inovasi Desa Pamanto sebagai Desa yang mewujudkan Program Andalan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat serius mewujudkan sarang burung walet dan porang sebagai sektor andalan. Dan Desa Pamanto ini menyambutnya dengan kerja, langsung action. Tidak hanya sibuk bernarasi soal kemandirian namun mewujudkannya dengan sangat cepat dan apik," kata Johan Rosihan

Johan mengatakan, dirinya akan menyampaikan kabar baik ini langsung kepada Menteri Pertanian, nantinya.

"Kita akan bangga menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa ada Desa di NTB yaitu Desa Pamanto yang sudah memulai program sarang burung walet ini sebagai pesan bahwa Sumbawa sudah mewujudkan keinginan pak Jokowi," ujarnya bangga.

Sementara Kepala Desa Pamanto, Iman Ikraman mengatakan, peresmian pusat budidaya sarang burung walet ini dilakukan sebagai tekad Desa sertempat dalam mengikuti dan mewujudkan arahan dari Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait dua sektor unggulan pemerintah pusat yaitu Sarang Burung Walet dan Porang.

"Potensi sarang burung walet di Pamanto cukup bagus, sehingga Pemdes Pamanto pun menginisiasi budidaya burung walet ini. Ini komitmen kami mendukung pemerintah pusat," kata H Iman Ikraman di sela kegiatan peresmian bangunan sarang burung walet, Rabu (03/11/2021).

Pembangunan pusat

budidaya sarang burung walet di Desa Pamanto dialokasikan dari APBDes 2020. Sementara tanah lokasi bangunan sarang burung Walet Desa Pamanto diwakafkan oleh Ketua PKK Desa Pamanto, Ema Yuniarti kepada dua Masjid desa.

"Dengan begitu, dua masjid di desa ini juga akan mendapatkan hasil dari keuntungan sarang burung walet 20% dan ke PADes 80%. Kita libatkan masyarakat dalam pengelolannya," ujarnya.

Menurut Iman Ikraman, hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemdes Pamanto untuk berinovasi mengembangkan potensi Desa yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin tunjukkan bahwa Desa Mandiri itu nggak hanya sebatas wacana dan slogan belaka. Inovasi adalah suatu keniscayaan kalau mau sejahtera. Kami juga merasa bahagia dan haru ketika Pemerintah Pusat juga akan mengembangkan Sarang Burung Walet sebagai Produk Andalan," tukasnya.

la mengatakan, untuk



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Kita akan bangga menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa ada Desa di NTB yaitu Desa Pamanto yang sudah memulai program sarang burung walet ini sebagai pesan bahwa Sumbawa sudah mewujudkan keinginan pak Jokowi"

jangka panjang nantinya Desa Pamanto tak hanya bangga dengan produksi kerupuk atom, masin dan komoditas lainnya tetapi juga memiliki produk baru sebagai triggernya yaitu Sarang Burut Walet.

"Kami optimistis Pamanto akan jadi salah satu role model desa mandiri, walau mungkin harus menunggu beberapa

tahun lagi. Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, akan tetapi dengan kerja bersama, tekad yang keras dan pantang menyerah, Inshaa Allah Pamanto akan menjelma jadi desa yang menjadi kekuatan bagi desa-desa lainnya," ujar Iman.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Peduli Pengusaha UMKM Kafe Kopi

# Nurhasan Salurkan Hibah Mesin Roasting Inovasi BRIN

### KUTIPAN

Majalengka (05/11) --- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberi bantuan hibah mesin panggang atau penyangrai kopi (roasting) hasil inovasi IPB kepada warga Majalengka, bersama Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Nurhasan Zaidi.

Pemberian hibah dilatar belakangi aspirasi dari masyarakat bahwa di Majalengka terdapat lebih dari 60 Kafe Kopi serta memiliki hutan Kebun Kopi.

"Saya dapat aspirasi dari bawah, untuk itu saya usulkan pada badan riset ini dan Alhamdulillah dapat roasting kopi dan helm inovasi" kata Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi.

Aleg dari Dapil Jabar IX ini menjelaskan mesin roasting yang dihibahkan untuk 3 Kabupaten (Majalengka, Subang dan Sumedang) diharapkan dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Bantuan ini adalah hasil hasil riset BRIN, termasuk mesin sangrai kopi atau roasting dalam jumlah cukup banyak. Dan kami apresiasi

hibah tersebut karena di Majalengka ada 60 lebih Kafe Kopi dan kita punya kebun kopi. Tapi saya dengar dari masyarakat kebun kopi kita dijual keluar Majalengka lalu balik lagi Majalengka dengan brand daerah lain," ungkap Nurhasan.

Dengan demikian kata Nurhasan, saat warga Majalengka mulai menggeliat Pemda Majalengka hendaknya tanggap dan lebih semangat karena dari kementerian pusat badan riset ini langsung turun dan memberi bantuan secara kongkrit.

"Tentu, saya tanpa bantuan dari Pemda membina masyarakat dan mendorong bahkan jangan sampai kopi kita kebun kopi dijual tapi branding-nya bukan merek Majalengka, namun ternyata

masyarakat Majalengka selama ini kreatif sendiri bikin penggilingan kopi sendiri. Maka disini peran negara harus hadir baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah," tandasnya.

Menindaklanjuti 8 mesin roasting bantuan dari badan riset dan inovasi nasional (BRIN) Nurhasan mengundang para pegiat kafe kopi dan pebisnis kopi pemula dalam reses yang digelar di Graha Kartini, Majalengka.

Menurut Nurhasan, ada keistimewaan pada mesin penggerak mesin roasting tersebut yang bisa digunakan dengan tiga cara yaitu gas, listrik dan panel tenaga Surya.

"Ini teknologi yang luar biasa sebagai upaya menyiapkan Majalengka kedepan setelah Pandemi Covid dalam 2tahun ini, masyarakat harus kita push. Ini mungkin langkah kecil tapi langkah besar selalu akan dimulai dengan langkah kecil," pungkasnya

Sementara itu hadir langsung dalam penyerahan hibah mesin roasting kopi sebanyak 8 mesin tersebut, Plt. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga Masyarakat dan UMKM, Hardi Julendra.



**H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Bantuan ini adalah hasil-hasil riset BRIN, termasuk mesin sangrai kopi atau roasting dalam jumlah cukup banyak. Dan kami apresiasi hibah tersebut karena di Majalengka ada 60 lebih Kafe Kopi dan kita punya kebun kopi. Tapi saya dengar dari masyarakat kebun kopi kita dijual keluar Majalengka lalu balik lagi Majalengka dengan brand daerah lain,"



# Bukhori Beberkan Isu Aktual Seputar Umrah dan Haji kepada Calon Jemaah asal Salatiga

## KUTIPAN

Salatiga (01/11) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah informasi terkini seputar haji dan umrah.

Bukhori mengatakan, kemampuan setiap negara dalam mengendalikan pandemi dan upaya setiap pemerintah dalam melakukan lobi tingkat tinggi dengan Arab Saudi adalah kunci untuk memperoleh izin masuk ke Arab Saudi.

"Alhamdulillah atas izin Allah, pandemi di Indonesia kian membaik. Perkembangan cakupan vaksinasi nasional juga sudah berjalan ke arah yang positif serta didukung dengan budaya masyarakat untuk disiplin prokes yang kian tinggi. Saya kira ini yang menjadi bahan pertimbangan Saudi sehingga memberikan izin bagi kita untuk melaksanakan umrah sebagaimana kabar ini telah mereka sampaikan melalui kawat diplomatik ke Kemenlu RI," terang Bukhori dalam agenda Sosialisasi Pembatalan Haji 2021 di Kota

Salatiga, (29/10/2021).

Politisi dapil Salatiga ini mengatakan, izin umrah bagi Indonesia merupakan sinyal positif bagi rencana pelaksanaan haji di tahun 2022 sepanjang pemerintah Indonesia mampu menjaga kepercayaan pemerintah Arab Saudi dengan mengendalikan pandemi secara teratur dan transparan.

Selain itu, Bukhori juga menerangkan soal pembangunan infrastruktur terkini di Mekah yang memungkinkan untuk menampung lebih banyak jemaah haji. Harapannya, semakin besar kapasitas yang dibangun akan berdampak pada bertambahnya kuota haji Indonesia sehingga bisa memangkas daftar tunggu haji di dalam negeri.

"Dengan pembangunan Mina yang dibuat bertingkat, kita berharap kuota haji kita

bertambah dari 200 ribu menjadi dua atau tiga kali lipat. Walhasil, ini bisa mengurangi daftar tunggu jemaah kita yang sebelumnya antara 25 sampai 35 tahun, maka bisa dipersingkat," ujarnya.

Meskipun Indonesia telah memperoleh izin, anggota Komisi VIII DPR RI ini memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi bagi penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

"Tantangan kita saat ini antara lain soal sinkronisasi antara aplikasi PeduliLindungi dan Tawakalna milik Arab Saudi. Terbaru, saya baru saja memperoleh kabar bahwa sinkronisasi ini telah memasuki tahap finalisasi. Kedua, persoalan vaksin booster dan ketiga adalah persoalan isolasi dan biaya karantina," terangnya.

"Saya berharap, Pemerintah mampu menyusun skema penyelenggaraan umrah yang aman, sehat, dan tidak memberatkan calon jemaah. Sebab, keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan umrah tahun ini akan menjadi modal penting bagi penyelenggaraan haji 2022," pungkasnya.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Tantangan kita saat ini antara lain soal sinkronisasi antara aplikasi PeduliLindungi dan Tawakalna milik Arab Saudi. Terbaru, saya baru saja memperoleh kabar bahwa sinkronisasi ini telah memasuki tahap finalisasi. Kedua, persoalan vaksin booster dan ketiga adalah persoalan isolasi dan biaya karantina





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

# PKS Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan Terkait Polemik PP No. 85 tahun 2021

## KUTIPAN

Jakarta (09/11) - Legislator Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan menerima penyampaian aspirasi secara langsung dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Selasa (09/11/2021) di Lantai 3 Ruang Meeting 3 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Gedung Nusantara I DPR RI

Dalam aspirasinya, HNSI meminta untuk tidak diberlakukannya PP No. 85 tahun 2021 tentang Kenaikan Pajak pada sektor Perikanan di masa pandemi Covid-19.

"Kami berharap ada perhatian khusus kepada kami para nelayan tradisional dari 'stakeholders' atau pihak yang memangku kebijakan untuk membantu para nelayan dan pedagang ikan yang kami sampaikan melalui FPKS DPR RI," Ucap salah satu anggota HNSI.

Sepaham dengan pernyataan tersebut, Legislator Fraksi PKS DPR RI Johan Rosihan sangat mengerti atas

apa yang dirasakan oleh para nelayan dan pedagang ikan saat ini akibat kesusahannya di masa pandemi Covid-19.

"PP No. 85 tahun 2021 ini sangat memberatkan bagi para nelayan, awalnya kami sudah pernah menyampaikan bayangan keberatan isu ini pada rapat komisi, dan ternyata setelah adanya pemaparan dan keluhan-keluh bapak-bapak nelayan sekalian lebih terbukti lagi dalam memperjuangkan aspirasi ini," Ucap Politisi Dapil Nusa Tenggara Barat I.

Melihat kondisi tersebut, dengan realitas hasil tangkapan nelayan yang sangat sedikit

jumlahnya dan mengalami penurunan harga sebesar 30% ditambah lagi dengan adanya persaingan ikan-ikan impor dari berbagai negara seperti China, Malaysia, India, Jepang, dan lainnya membuat keadaan para nelayan semakin terjepit.

"Kami sangat senang dan berterima kasih atas masukan yang sudah disampaikan saat ini dari para nelayan. Semoga ini dapat menjadi pemantik amanat pembangun di Indonesia. Kami janji, akan segera menyusun langkah-langkah taktis maupun strategis agar ini tidak diberlakukan PP No. 85 tahun 2021," Ucap Johan dalam pernyataan penutupnya dengan lugas.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"PP No. 85 tahun 2021 ini sangat memberatkan bagi para nelayan, awalnya kami sudah pernah menyampaikan bayangan keberatan isu ini pada rapat komisi, dan ternyata setelah adanya pemaparan dan keluhan-keluh bapak-bapak nelayan sekalian lebih terbukti lagi dan memperkuat data kami dalam memperjuangkan aspirasi ini"



Peringatan Maulid Nabi Muhammad

# HNW: Momentum Introspeksi Pemimpin dan Calon Pemimpin

**KUTIPAN**

Jakarta (31/10) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menegaskan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperdalam cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, untuk memperkuat komitmen menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan termasuk dalam aspek kepemimpinan.

“Penting dimaknai demikian, agar para Pemimpin bisa introspeksi untuk memperbaiki kepemimpinannya dan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Di tengah apatisme Umat dan Rakyat. Di tengah tantangan kehidupan yang makin kompleks. Termasuk akibat dari Covid-19. Dengan kita memperingati Maulid, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan, karena keteladanan Nabi Muhammad SAW selain dalam bidang akhlak juga dalam

bidang kepemimpinan, bahkan sukses kepemimpinan baik dalam skala pribadi, sosial kemasyarakatan, bahkan kepemimpinan politik/kenegaraan. Ayat ke 21 dari surah al Ahzab, yang dirujuk terkait menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan, adalah bagian dari rangkaian ayat dari ayat ke 9 hingga ayat ke 27 dari surah al-Ahzab yang menghadirkan bukti keunggulan kepemimpinan Rasulullah SAW yang menjadi teladan dan relevan di setiap zaman dan peran. Terlebih lagi di zaman yang penuh tantangan

dan polemik, sudah semestinya kita mengusahakan, mencari, dan memilih sosok pemimpin yang menerapkan model kepemimpinan Rasulullah SAW,” demikian disampaikan Hidayat yang akrab dipanggil HNW ini dalam sambutan secara virtual pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu (30/10) yang diselenggarakan oleh DPD PKS Jakarta Selatan.

Acara yang diselenggarakan secara campuran daring dan luring ini turut dihadiri juga oleh sejumlah Ulama, diantaranya Syukron Makmun, Abdullah Bin Ja'far Al Habsyi, Ghozali MUSHONIF, Sidqi Yahya, dan sejumlah ulama dan tokoh lainnya. Turut hadir pula Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II Kurniasih Mufidayati, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Plt. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Lurah Duren Tiga, Camat dan Kapolsek Pancoran.

Dalam ceramahnya, HNW menjelaskan model kepemimpinan dari keteladanan Rasulullah SAW yang telah diabadikan dalam Al Quran.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

“Dengan kita memperingati Maulid, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan, karena keteladanan Nabi Muhammad SAW selain dalam bidang akhlak juga dalam bidang kepemimpinan, bahkan sukses kepemimpinan baik dalam skala pribadi, sosial kemasyarakatan, bahkan kepemimpinan politik/kenegaraan

“Kisah perang Ahzab yang diabadikan Allah SWT dalam Al Quran mengabarkan kepada kita betapa peliknya situasi kaum muslimin saat itu, dengan banyaknya musuh, keraguan, hasutan, pengkhianatan,

konspirasi, dan tindakan berbahaya lainnya dari pihak kaum musyrikin dan Yahudi Quraizhah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Dukung Penolakan Ormas Soal Permen Kekerasan Seksual, **HNW Sarankan Presiden Tegur Mendikbudristek**

## KUTIPAN

Jakarta (06/11) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengulangi membuat Peraturan yang kembali ditolak banyak pihak

karena Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi itu sarat dengan ketentuan yang tak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945 serta peraturan perundangan di atasnya.

Mendikbud-Ristek menyampaikan peraturan tersebut juga telah ditolak oleh masyarakat luas sebagaimana dinyatakan oleh 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).

Dari DPR, kata HNW, Fraksi PKS juga tegas menolak karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama, serta tidak memiliki landasan

hukum yang spesifik dan bahwa aturan mengenai kekerasan seksual yang dirujuk oleh Permen itu justru sudah dibatalkan oleh DPR, dan aturan yang sekarang masih dibahas di DPR-RI sudah tidak relevan dengan prinsip yang dirujuk oleh Permen tersebut.

Hidayat juga mengingatkan bahwa pembuatan aturan Menteri yang mengabaikan norma Agama, UUD NRI 1945 dan tidak sesuai dengan landasan hukum di atasnya, bukan pertama kalinya dilakukan oleh Mendikbudristek, sudah beberapa kali kasus serupa terjadi.

“Saya dukung 13 Ormas Islam dan Fraksi PKS serta masyarakat luas yang secara terbuka, argumentatif dan konstitusional menolak Permendikbud 30/2021. Dan

ini menambah daftar panjang aturan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Selain peraturan tersebut yang harus segera ditarik dan direvisi, saya juga mendesak Presiden Jokowi untuk menegur Mas Menteri Nadiem agar kejadian serupa tak terus berulang,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (05/11/2021).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai, secara eksplisit & substantif peraturan menteri soal kekerasan seksual di Perguruan Tinggi itu jelas tidak menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai spirit dasar pembentukannya, terlihat dengan tidak dimasukkannya norma Agama dan tujuan dari pendidikan nasional yang diatur oleh UUD-NRI 1945 yakni agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa.

“Sangat jelas ketentuan-ketentuan dalam Permendikbud tersebut masih menggunakan paradigma kekerasan dan persetujuan dalam hal aktivitas



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

“Sewajarnya Presiden Jokowi menegur Mendikbudristek secara tegas dan terbuka supaya tidak dipahami bahwa berbagai kesalahan itu adalah visi misi Presiden. Kemendikbud harusnya bisa jadi teladan dalam berpendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD-NRI 1945

seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Sehingga ketentuan-nya masih menghadirkan sanksi bila ada kekerasan dan bila tidak terjadi persetujuan, karenanya bila dalam hal hubungan seksual tidak terjadi kekerasan dan terjadi

persetujuan, maka itu bukan pelanggaran, sekalipun itu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, serta bertentangan dengan norma Agama, hukum dan norma ketimuran.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Poster Deklarasi Anies-Ganjar yang Memuat Logo PKS adalah **Hoax**

## KUTIPAN

Jakarta (08/11) — Sekjen PKS Aboebakar Al Habsyi menyampaikan klarifikasi tersebut bahwa poster deklarasi Anies - Ganjar yang mencantumkan logo PKS adalah Hoax.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini tegas menyatakan pihaknya tidak mengetahui perihal deklarasi pasangan tersebut.

"Kami tidak tahu menahu soal poster deklarasi Anis-Ganjar tersebut. Bisa saya pastikan itu hoax. PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anis-Ganjar dengan partai manapun," disampaikan Habib Aboe dalam keterangan tertulis, Senin (08/11) di Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa sampai saat ini PKS belum memutuskan nama untuk diusung sebagai Capres.

"Dalam mekanisme internal PKS nama capres akan kami tetapkan dalam Musyawarah Majelis Syuro," ujar Habib.

Sebagai informasi, bahwa

dalam putusan terakhir yaitu dalam Musyawarah Majelis Syuro Ke V, diputuskan untuk mendorong Habib Salim Segaf Aljufri untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.

Dorongan dari Majelis Syuro ini dilatar belakangi karena bangsa ini sedang menghadapi banyak masalah, termasuk COVID-19, pemberantasan korupsi, masalah penegakan hukum, masalah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan kita sadari bersama bahwa bangsa ini cenderung berpandangan paternalistik, biasanya sangat merujuk pada patronnya.

"Oleh karenanya kita perlu menampilkan tokoh yang bisa dijadikan teladan. Untuk itu, kami mendorong agar Habib Salim Segaf Aljufri tampil disitu" pungkas Habib Aboe.



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Sekjen DPP PKS

"Kami tidak tahu menahu soal poster deklarasi Anis-Ganjar tersebut. Bisa saya pastikan itu hoax. PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anis-Ganjar dengan partai manapun"



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***